

Anisah | Nita Qonita
Ilham Sany | Annisa Ulfatul M
Khudzaifah Roqqi A | Putri Kisti Bela Dini
Wildana Khairun Nisa'



Administrasi

KURIKULUM DAN IMPLEMENTASINYA

DI SEKOLAH DASAR



Editor:
Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd.,CLSP

ADMINISTRASI KURIKULUM DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH DASAR

Anisah
Nita Qonita
Ilham Sanny
Annisa Ulfatul M
Khudzaifah Roqqi A
Putri Kisti Bela Dini
Wildana Khairun Nisa'



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ADMINISTRASI KURIKULUM DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH DASAR

Penulis:

Anisah

Nita Qonita

Ilham Sanny

Annisa Ulfatul M

Khudzaifah Roqqi A

Putri Kisti Bela Dini

Wildana Khairun Nisa'

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Septian Nur Ika Trisnawati, M.Pd, CLSP

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

Vi, 68, Uk: 15,5 x 23 cm

QRCBN : 62-415-2088-705

Cetakan Pertama:

Agustus 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga buku ini yang berjudul “Administrasi Kurikulum dan Implementasinya di Sekolah Dasar” dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membangun karakter dan kecakapan anak. Di dalamnya, kurikulum menjadi komponen inti yang mengarahkan tujuan, proses, serta hasil pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang administrasi kurikulum dan bagaimana implementasinya di sekolah dasar menjadi sangat penting, khususnya bagi pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa kependidikan, serta pengelola lembaga pendidikan. Buku ini disusun berdasarkan kajian teoritis dan pengalaman praktis yang diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus pedoman dalam mengelola dan mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan efisien. Kami berusaha menyajikan pembahasan secara sistematis, mulai dari konsep dasar administrasi kurikulum hingga implementasinya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata dalam dunia pendidikan.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KONSEP ADMINISTRASI KURIKULUM.....	2
A. Pengertian Administrasi Kurikulum	2
B. Tujuan dan Fungsi Administrasi Kurikulum	7
C. Prinsip dan Ruang Lingkup Administrasi Kurikulum	13
D. Organisasi Administrasi Kurikulum	15
BAB III SEJARAH DAN PERUBAHAN KURIKULUM DI INDONESIA.....	16
A. Sejarah Kurikulum di Indonesia (1947-sekarang).....	16
B. Faktor Penyebab Perubahan Kurikulum.....	25
BAB IV PELAKU DAN PROSES ADMINISTRASI KURIKULUM.....	29
A. Peran Guru dalam Administrasi Kurikulum	29
B. Proses Administrasi Kurikulum (Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Evaluasi).....	32
BAB V KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KURIKULUM.....	37
A. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kurikulum.....	37
B. Strategi Pengembangan Administrasi Kurikulum	43
C. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah.	47

BAB VI IMPLEMENTASI ADMINISTRASI KURIKULUM DI SD AL	
IRSYAD SURAKARTA	52
A. Perjalanan dan Implementasi Kurikulum	52
B. Pelaku Administrasi Kurikulum	55
C. Program Unggulan: Ziyadah Tahfidz	56
D. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum.....	60
E. Sarana Pendukung	63
BAB VII PENUTUP	64
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membangun peradaban dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pendidikan, kurikulum memegang peran sentral sebagai pedoman dan arah bagi seluruh kegiatan pembelajaran. Kurikulum tidak hanya berisi kumpulan mata pelajaran, tetapi juga mencerminkan visi pendidikan suatu bangsa. Oleh karena itu, pengelolaan kurikulum yang baik menjadi keharusan agar proses pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah.

Administrasi kurikulum hadir sebagai bidang yang secara khusus mengatur dan mengelola seluruh aspek yang berkaitan dengan kurikulum di satuan pendidikan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kurikulum, semuanya menjadi bagian dari administrasi kurikulum. Tanpa adanya pengelolaan yang sistematis dan profesional, kurikulum yang baik di atas kertas bisa saja gagal diimplementasikan di lapangan.

Administrasi kurikulum juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi keilmuan yang dibutuhkan peserta didik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi perkembangan zaman yang begitu cepat dan kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap konsep administrasi kurikulum sangat penting bagi calon pendidik.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk mengkaji lebih dalam mengenai administrasi kurikulum, baik secara teoritis maupun praktis. Harapannya, pembaca dapat memahami bagaimana kurikulum seharusnya dikelola dan diimplementasikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara maksimal.

BAB II

KONSEP ADMINISTRASI KURIKULUM

A. PENGERTIAN ADMINISTRASI KURIKULUM

1. Pengertian Administrasi

Secara bahasa, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* mempunyai arti yang sama dengan kata *to* dalam bahasa Inggris, yang berarti "ke" atau "kepada". Dan kata *ministrare* sama artinya dengan kata *to serve* atau *to conduct* yang berarti "melayani", "membantu" atau "mengarahkan". Dalam bahasa Inggris *to administer* berarti pula "mengatur", "memelihara" (*to look after* dan "mengarahkan"). Di dalam kamus besar Indonesia tahun 2008:13 menyatakan bahwa administrasi:

- a. semua usaha bersama-sama untuk mengelolah semua sumbernya secara efisien dan efektif.
- b. kerangka kegiatan kerja dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin; tata usaha.

Jadi kata "administrasi dapat diaertikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengelolah, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai tujuan.

Administrasi dapat dipandang sebagai suatu kewajiban dan tugas. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan pengendalian merupakan seluruh proses yang termasuk dalam proses yang berkaitan dengan kegiatan administrasi, dan proses-proses tersebut secara bersama-sama disebut dengan administrasi (Meriza, 2018).

2. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curare* yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish (Langgulang, 1986). Sedangkan kurikulum pendidikan (*manhaj al-dirāsah*) dalam kamus Tarbiyah adalah seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan Pendidikan (Langgulang, 1986).

Menurut KBBI kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan, dan perangkat mata kuliah mengenai bidang keahlian khusus. Pengertian kurikulum menurut UU No 20 Tahun 2003 kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pengertian kurikulum menurut para ahli J. Galen Saylor dan William M. Alexander Kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah atau di luar sekolah termasuk kurikulum. Smith Kurikulum dipandang sebagai seperangkat usaha dan upaya pendidikan yang bertujuan agar anak didik memiliki kemampuan hidup bermasyarakat. Menurut Hilda Taba, Kurikulum merupakan suatu rancangan pembelajaran yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai hal mengenai proses pembelajaran serta perkembangan individu.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Rusman, 2009).

Pendapat lain dikemukakan oleh Afriansyah, yang menjelaskan bahwa kurikulum adalah pedoman atau rambu-ramu dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, maka kurikulum tidak boleh dirancang sembarangan. Rancangan ini bisa tertulis maupun tidak, yang terpenting ialah ditujukan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Administrasi kurikulum merupakan serangkaian proses yang dijalankan

dengan sengaja dan sungguh-sungguh dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Administrasi kurikulum adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan sistem pembelajaran yang berkelanjutan dan terus-menerus, dengan tujuan mendukung sistem pendidikan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, aktivitas dalam administrasi kurikulum tidak lain adalah berbagai tindakan yang bertujuan untuk menjalankan dan meningkatkan kurikulum sehingga kurikulum dapat dipahami dan diterapkan dengan baik.

3. Komponen-Konponen Kurikulum

Kurikulum memiliki beberapa komponen, seperti: tujuan, isi atau materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum dan evaluasi. Kelima komponen tersebut saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan (Sugiartha 2016).

1. Tujuan

Hakikatnya tujuan kurikulum adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik. Tujuan kurikulum diklasifikasikan dalam 4 tujuan, sebagai berikut: (Sukmawati 2021)

a. Tujuan Pendidikan Nasional (TPN).

Dalam setiap lembaga pendidikan harus mampu membentuk manusia sesuai dengan rumusan baik dalam pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal maupun nonformal. Tujuan umum pendidikan nasional adalah membimbing seluruh warga Indonesia sehingga menjadi manusia Pancasila yang berpribadi dan berkesadaran ketuhanan, berkesadaran dalam bermasyarakat, mampu membudayakan alam dan sekitarnya.

b. Tujuan Institusional

Setiap lembaga pendidikan harus mencapai tujuan institusional yang mana tujuan ini merupakan tujuan untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap tentang pendidikan, seperti kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan dan jenjang pendidikan tinggi (Soetopo Drs.Hendayat 2008).

Jenjang pendidikan dasar, tingkat satuan pendidikan tingkat menengah memiliki tujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan kepribadian akhlak dan keterampilan hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kelulusan pada satuan pendidikan tingkat kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan pengetahuan dan akhlak mulia serta memiliki keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan kejurumannya. Standar kelulusan pada tingkat satuan pendidikan tingkat jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemandirian serta sikap mengembangkan teknologi dan seni yang bermanfaat bagi manusia (Sukmawati 2021).

c. Tujuan kulikuler

Tujuan ini harus dicapai oleh setiap bidang mata pelajaran, tujuan kulikuler dapat diidentifikasi sebagai kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Tujuan kulikuler dalam pengembangan kurikulum sering diberikan istilah standar kompetensi (KS) dan pada kurikulum 2013 memiliki istilah kompetensi inti (KI).

d. Tujuan pembelajaran/ instruksional

Peserta didik mampu memenuhi kompetensi setelah mengikuti pembelajaran pada tema dan topic tertentu.

2. Isi

Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki peserta didik serta semua aspek baik yang berhubungan dengan materi pelajaran yang biasanya tergambarkan pada isi setiap mata pelajaran yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan peserta didik. Materi maupun aktivitas tersebut seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi : (Jumriani, Syaharuddin, and Mutiani 2021)

a. Logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan

- b. Etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai dan moral
 - c. Estetika, yaitu pengetahuan tentang indah-jelek, yang ada niai seninya
3. Strategi Pembelajaran
- Strategi merujuk pada metode dan pendekatan serta peralatan mengajar yang digunakan dalam proses belajar. strategi pembelajaran menggambarkan cara yang akan ditempuh dalam pelaksanaan pembelajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan baik bersifat khusus maupun umum dalam proses pembelajaran.
4. Organisasi Kurikulum

Organisasi kurikulum sangat terkait dengan pengaturan bahan pelajaran yang ada dalam kurikulum, sedangkan yang menjadi sumber bahan pelajaran dalam kurikulum adalah nilai budaya, nilai sosial, aspek siswa dan masyarakat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi (Rusman 2009, 60). Berkenaan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, tampaknya lebih cenderung menggunakan pengorganisasian yang bersifat eklektik, yang terbagi ke dalam lima kelompok mata pelajaran, yaitu:

- a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,
- b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian,
- c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi,
- d. kelompok mata pelajaran estetika,
- e. kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan (Sugianto 2016).

Kelompok-kelompok mata pelajaran tersebut selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam sejumlah mata pelajaran tertentu, yang disesuaikan dengan jenjang dan jenis sekolah. Disamping itu, untuk memenuhi kebutuhan lokal disediakan mata pelajaran muatan lokal serta untuk kepentingan penyaluran bakat dan minat peserta didik disediakan kegiatan pengembangan

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam organisasi kurikulum, antara lain:

- a) Konsep, yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu

diamati, konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep, seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas, dan kualitas, ruang, dan evolusi.

- b) Generalisasi, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari suatu analisis. Kita harus membedakan antara kesimpulan dan rangkuman. Banyak orang yang keliru dalam menarik kesimpulan karena apa yang dilakukannya adalah membuat rangkuman. Misalnya, setiap orang baik sebagai subjek maupun sebagai objek berperilaku secara manusiawi.
- c) Keterampilan, yaitu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan. Misalnya, organisasi pengalaman belajar berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan menginterpretasikan data.
- d) Nilai-nilai, yaitu norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku. Misalnya, menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial-ekonomi (Arifin 2011, 96–97).

5. Evaluasi

Evaluasi kurikulum sebagai evaluasi program akses kerja yang ditinjau dari berbagai kriteria seperti efektivitas, relevansi efisiensi dan feasibility program. Evaluasi memiliki peran penting dalam kebijakan pendidikan dan pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri (Nur Azmi Rohimajaya, Rudi Hartono, Issy Yuliasri and Pascasarjana 2022).

B. TUJUAN DAN FUNGSI ADMINISTRASI KURIKULUM

1. Tujuan Administrasi Kurikulum

Administrasi kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang memiliki peran strategis dalam mengarahkan proses pembelajaran agar sesuai dengan tujuan pendidikan

nasional. Administrasi kurikulum tidak hanya berkaitan dengan penyusunan dokumen kurikulum, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum secara sistematis dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari administrasi kurikulum antara lain sebagai berikut:

- a. Menjamin Kesesuaian Kurikulum dengan Tujuan Pendidikan.

Tujuan utama administrasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa semua aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah sesuai dengan arah dan kebijakan pendidikan nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini penting agar kurikulum dapat mencetak peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan memiliki karakter mulia.

- b. Memberikan Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Proses Pembelajaran.

Administrasi kurikulum bertujuan agar proses belajar mengajar berjalan secara terencana, terorganisir, dan terkontrol. Dengan perencanaan kurikulum yang matang dan sistem evaluasi yang baik, pembelajaran dapat dilakukan secara efisien tanpa mengabaikan kualitas.

- c. Meningkatkan Kesesuaian dan Keefektifan Proses Pembelajaran.

Kurikulum yang dikelola dengan baik dapat menjadi acuan bagi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, seperti silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan media pembelajaran. Dengan demikian, proses belajar dapat berjalan dengan sistematis sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan.

- d. Mendukung Tercapainya Standar Kompetensi Peserta Didik.

Administrasi kurikulum bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang ditentukan dalam kurikulum nasional.

- e. Mendorong Inovasi dalam Pembelajaran.

Salah satu tujuan penting dari administrasi kurikulum adalah membuka ruang bagi pengembangan dan inovasi pembelajaran yang

menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, dan tuntutan zaman.

f. **Meningkatkan Kualitas Lulusan**

Melalui pengelolaan kurikulum yang terarah dan berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi sosial, spiritual, dan keterampilan hidup yang memadai.

2. Fungsi Administrasi Kurikulum

Administrasi kurikulum memiliki berbagai fungsi strategis yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan materi ajar, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. Administrasi kurikulum berperan dalam menjamin bahwa kurikulum yang diterapkan benar-benar relevan dengan kebutuhan peserta didik, sesuai dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab tantangan lokal maupun global. Adapun beberapa fungsi utama administrasi kurikulum adalah sebagai berikut:

a. **Meningkatkan Ketepatan Pemanfaatan Sumber Daya Kurikulum.**

Administrasi kurikulum berperan dalam meningkatkan kemampuan pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum melalui pengelolaan yang terencana dan efektif.

b. **Memberikan Pilihan dan Kesempatan Belajar yang Optimal bagi Peserta Didik.**

Kurikulum yang dikelola dengan baik mampu memberikan ruang bagi peserta didik untuk mencapai hasil belajar secara maksimal. Hal ini tidak hanya dicapai melalui kegiatan pembelajaran formal di kelas, tetapi juga melalui kegiatan tambahan di luar jam pelajaran yang dirancang untuk menunjang pencapaian tujuan kurikulum.

c. **Meningkatkan Kesesuaian dan Keefektifan Proses Pembelajaran.**

Pengelolaan kurikulum yang baik dapat menghasilkan proses pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun tuntutan lingkungan. Dengan demikian, proses belajar menjadi lebih bermakna dan kontekstual.

- d. Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru dan Aktivitas Belajar Siswa.

Administrasi kurikulum yang profesional, terpadu, dan efektif mampu menunjang kinerja guru dalam mengajar serta meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar. Hal ini berkontribusi langsung terhadap tercapainya tujuan pembelajaran.

- e. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Proses Belajar Mengajar.

Melalui pengawasan yang sistematis, administrasi kurikulum dapat memastikan kesesuaian antara desain kurikulum dan pelaksanaannya. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan praktik dapat diidentifikasi dan diperbaiki, sehingga proses belajar mengajar berlangsung secara lebih efisien dan efektif, serta mampu memotivasi guru dan peserta didik.

- f. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kurikulum.

Kurikulum yang dikelola secara profesional mendorong keterlibatan masyarakat dalam menyusun dan menyediakan bahan ajar atau sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik lokal. Hal ini turut mendukung pengembangan pendidikan yang berakar pada potensi dan kebutuhan daerah.

Fungsi Administrasi Kurikulum memiliki beberapa fungsi, beberapa di antaranya: (Mustopa, 2021).

- a) Meningkatkan efektivitas materi dan elemen kursus mungkin lebih diberdayakan dengan penggunaan dan pengelolaan yang bijaksana dan produktif
- b) Meningkatkan peluang bagi siswa untuk mencapai potensi penuh mereka—yaitu, hasil dan keterampilan terbaik mereka—melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler yang dilakukan secara etis untuk memenuhi target kurikulum
- c) Memperkuat efisiensi dan relevansi pendidikan berdasarkan kebutuhan lingkungan dan kebutuhan siswa belajar; kurikulum yang terkendali dengan baik mampu menawarkan peluang dan apa yang terjadi sesuai dengan pertimbangan kebutuhan siswa dan lingkungan belajar

- d) Memperkuat efisiensi penggunaan aktivitas siswa dan kinerja guru untuk memenuhi tujuan pembelajaran dan mengawasi kurikulum kompeten, efisien, dan gabungan dapat memotivasi aktivitas siswa dan kinerja guru
- e) Menumbuhkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar; prosesnya terus diamati untuk memastikan bahwa desain yang dimaksudkan dan pelaksanaan pembelajaran yang sebenarnya konsisten. Kesenjangan antara desain dan implementasi dapat dihindari dengan cara ini. Selain itu, lingkungan yang mendukung yang dipupuk oleh kegiatan manajemen kurikulum memberikan motivasi terus-menerus untuk memfasilitasi pembelajaran yang efisien dan produktif baik bagi pendidik maupun peserta didik.
- f) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kurikulum. Masyarakat akan dilibatkan dalam kurikulum yang dikelola secara profesional, khususnya ketika mengembangkan bahan ajar atau sumber belajar yang perlu disesuaikan dengan karakteristik unik dan kebutuhan perkembangan masyarakat setempat.

Kurikulum juga berfungsi bagi kepentingan-kepentingan yang lain (Soetopo & Soemanto, 1986) antara lain:

1. Fungsi Kurikulum Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pendidikan

Kurikulum suatu sekolah pada dasarnya merupakan suatu alat atau usaha untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan oleh sekolah tertentu yang dianggap cukup tepat dan penting untuk dicapai, maka salah satu tindakan yang mungkin diambil adalah meninjau kembali tujuan yang selama ini digunakan oleh sekolah tersebut. Dengan kata lain, jika tujuan-tujuan yang diinginkan tidak tercapai, maka orang cenderung untuk meninjau kembali alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain meninjau kurikulumnya. Jadi fungsi kurikulum di sini adalah sebagai alat atau jembatan untuk mencapai tujuan.

2. Fungsi Kurikulum bagi Anak

Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun, adalah disiapkan untuk anak/murid sebagai salah satu konsumsi pendidikan mereka. Dengan ini maka diharapkan mereka akan mendapat sejumlah pengalaman baru yang kelak kemudian hari dapat dikembangkan seiring dengan perkembangan anak, guna melengkapi bekal hidupnya.

3. Fungsi Kurikulum bagi Guru

Bagi guru kurikulum berfungsi sebagai: (a) Pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar para anak didik; b. Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan.

4. Fungsi Kurikulum bagi Kepala Sekolah dan Pembina Sekolah

Bahwa Kepala Sekolah sebagai seorang Administrator dan Supervisor juga mempunyai tanggung jawab dalam kurikulum. Oleh karena itu fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan para pembina lainnya adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi yaitu memperbaiki situasi belajar.
- b. Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak ke arah yang lebih baik.
- c. Sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi mengajar.
- d. Sebagai seorang administrator maka kurikulum dapat dijadikan pedoman untuk memperkembangkan kurikulum lebih lanjut.
- e. Sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar.

C. PRINSIP DAN RUANG LINGKUP ADMINISTRASI KURIKULUM

1. Prinsip Administrasi Kurikulum

Prinsip administrasi kurikulum adalah dasar-dasar yang menjadikan pedoman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi kurikulum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Perencanaan kurikulum di sekolah, termasuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, perlu berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 yang mengamanatkan agar pendidikan mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam penyusunannya, kurikulum tidak hanya memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tetapi juga harus mengacu pada sejumlah prinsip dasar yang menjadi acuan umum. Berikut adalah lima prinsip utama yang perlu diperhatikan:

a. Prinsip Relevansi

Kurikulum harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, serta perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, apa yang diajarkan di sekolah harus bermakna dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, termasuk kesiapan menghadapi dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat.

b. Prinsip Efektivitas

Kurikulum disusun agar mampu membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal. Setiap unsur dalam kurikulum—baik tujuan, isi, metode, maupun evaluasi—harus saling mendukung, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah dan berdampak.

c. Prinsip Efisiensi

Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum harus memperhatikan pemanfaatan waktu, tenaga, biaya, dan sumber daya lainnya secara bijak. Tujuannya adalah agar hasil pendidikan dapat dicapai tanpa menghamburkan sumber daya, namun tetap menjaga mutu pembelajaran.

d. Prinsip Kontinuitas

Kurikulum perlu dirancang secara bertahap dan berkesinambungan. Setiap jenjang pendidikan harus membangun fondasi bagi jenjang

berikutnya, sehingga perkembangan peserta didik berlangsung secara sistematis dan tidak terputus.

e. Prinsip Fleksibilitas

Kurikulum sebaiknya tidak kaku, melainkan memberikan ruang untuk penyesuaian. Sekolah dan guru harus diberi keleluasaan untuk menyesuaikan isi dan pelaksanaan kurikulum dengan kondisi lokal, karakteristik peserta didik, serta tantangan zaman yang terus berubah.

2. Ruang Lingkup Administrasi Kurikulum

Ruang lingkup administrasi kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum. Pada tingkat sekolah kegiatan kurikulum lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan.

Kegiatan-kegiatan administrasi kurikulum dititikberatkan pada usaha-usaha pembinaan situasi belajar-mengajar di sekolah agar selalu terjamin kelancarannya. Dalam buku yang berjudul *Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* karya Dr. Mukhtar Hadi, M.Si. disebutkan bahwa kegiatan manajemen kurikulum yang terpenting disini dapat disebutkan dua hal yakni:

- a. Kegiatan yang berhubungan dengan tugas guru:
 - 1) Pembagian tugas mengajar.
 - 2) Pembagian tugas/tanggung jawab dalam membina ekstrakurikuler.
 - 3) Koordinasi penyusunan persiapan mengajar.
- b. Kegiatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan belajar mengajar:
 - 1) Penyusunan jadwal pelajaran.
 - 2) Penyusunan program (rencana) berdasar satuan waktu tertentu (caturwulan, semesteran, tahunan).
 - 3) Pengisian daftar kemajuan murid.
 - 4) Penyelenggaraan evaluasi hasil belajar.

- 5) Laporan hasil evaluasi.
- 6) Kegiatan bimbingan penyuluhan.

D. ORGANISASI ADMINISTRASI KURIKULUM

Muhammad Ali menyatakan bahwa organisasi kurikulum merupakan suatu cara menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang ingin dicapai (Ali 2005, 108). Organisasi kurikulum adalah susunan komponen kurikulum, seperti konten kurikulum, kegiatan dan pengalaman belajar, yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan (Ansyaar 2015, 371). Organisasi kurikulum adalah susunan pengalaman dan pengetahuan baku yang harus disampaikan dan dilakukan peserta didik untuk menguasai kompetensi yang telah ditetapkan (Arifin 2011, 94).

Ada beberapa kriteria dalam merumuskan organisasi kurikulum yang efektif. Menurut Oemar Hamalik, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan organisasi kurikulum, yaitu (Hamalik 1980, 103):

- a. Ruang lingkup bahan (scope) adalah keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu bidang studi atau dari sesuatu pokok bahasan tertentu. Selain itu sesuatu pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan juga mengandung ruang lingkungannya tersendiri. Ruang lingkup bahan itu merupakan perincian dari pada pokok atau topic tersebut. Kejelasan tentang perincian bahan tersebut dapat kita peroleh dari dalam buku paket atau sumber pokok dari pelajaran yang telah ditentukan.
- b. Urutan (sequence) adalah penyusunan bahan pelajaran menurut aturan tertentu secara berurutan, urutan bahannya disusun sedemikian rupa agar menunjukkan sistematika dan memudahkan penyampaian maupun penangkapan oleh para siswa.
- c. Penempatan bahan (grade placement) adalah penempatan beberapa bahan pelajaran untuk kelas tertentu. Penempatan bahan pelajaran tersebut dihubungkan dengan ruang lingkup bahan dan diserasikan dengan urutan bahan pelajaran.

BAB III

SEJARAH DAN PERUBAHAN KURIKULUM DI INDONESIA

A. SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA (1947-SEKARANG)

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, sistem kurikulum pendidikan nasional telah mengalami berbagai dinamika dan perubahan signifikan. Setiap perubahan kurikulum mencerminkan respons terhadap tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, perubahan sosial, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum tidak hanya menjadi pedoman teknis dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi cerminan dari arah dan visi pembangunan bangsa. Perubahan kurikulum menurut Nasution (dalam Muhammedi, 2016) yakni mengenai tujuan atau cara untuk mencapai suatu tujuan dan perubahan kurikulum berarti merubah manusia. Perubahan kurikulum terjadi jika terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum. Berikut adalah perjalanan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia:

1. Kurikulum 1947 (*Rentjana Pelajaran* 1947)

Merupakan kurikulum pertama yang diterapkan setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1947 kurikulum ini diberi nama *Rentjana Pelajaran 1947* yang mana kurikulum pendidikan pada masa itu dipengaruhi oleh colonial Belanda dan Jepang, tetapi telah menunjukkan arah baru dengan menitik beratkan pada pembentukan karakter bangsa yang merdeka dan berdaulat. Karakteristiknya masih bersifat normatif dan belum disusun secara sistematis dalam bentuk tertulis. Ciri khas kurikulum ini adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari (Azhar, 2020).

Materi pembelajaran disusun secara kontekstual sesuai dengan kehidupan sehari-hari, termasuk kesenian dan pendidikan jasmani, sementara pendidikan akademik atau pemikiran umum belum menjadi prioritas utama. Pada masa ini, banyak Sekolah Rakyat didirikan dengan masa pendidikan sekitar enam tahun, yang memberikan keterampilan praktis di bidang pertanian, pertukangan, perikanan, dan keahlian lain yang langsung dapat digunakan untuk bekerja, terutama bagi masyarakat miskin. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia, dan di beberapa daerah juga diajarkan bahasa daerah. Kurikulum ini mencerminkan upaya awal bangsa Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang merdeka dan berorientasi pada kebutuhan nasional pasca-kemerdekaan (Nurafiati, 2022).

2. Kurikulum 1952

Kurikulum ini menandai awal sistematisasi pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran mulai dirumuskan dengan lebih jelas dan mata pelajaran disusun lebih terperinci. Penekanan utamanya adalah pada nasionalisme dan identitas bangsa dalam kerangka pendidikan formal. Dalam konteks Rentjana Pelajaran Terurai 1952, mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang study, yaitu : 1) Moral; 2) Kecerdasan; 3) Emosionalistik; 4) Keterampilan dan 5) Jasmani.

Kurikulum ini diterapkan sistem di mana setiap guru hanya mengajar satu mata pelajaran, sehingga guru dapat lebih menguasai bidangnya secara mendalam. Kurikulum 1952 juga lebih merinci silabus dan materi setiap mata pelajaran dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, mencakup berbagai kelompok mata pelajaran seperti bahasa (Indonesia, Inggris, bahasa daerah), ilmu pasti, pengetahuan alam, sosial, ekonomi, dan ekspresi. Tujuan utama kurikulum ini adalah memperkuat nilai-nilai kebangsaan, identitas nasional, dan rasa nasionalisme melalui pendidikan, serta mengorientasikan materi pembelajaran pada kebutuhan hidup siswa agar hasil pendidikan dapat langsung berguna di masyarakat. Meskipun belum merata di seluruh wilayah Indonesia, kurikulum ini mencerminkan upaya pemerataan pendidikan dan pengembangan karakter bangsa secara lebih sistematis.

3. Kurikulum 1964

Kurikulum 1964 bersifat *separate subject curriculum*, yang memisahkan mata pelajaran berdasarkan lima kelompok bidang studi (Pancawardhana) Pancawardhana yaitu pengembangan lima aspek utama: moral, intelektual, keterampilan, emosional, dan jasmani. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Pada tahun 1964 pemerintah mengalami penyempurnaan kurikulum yang mana pada tahun ini konsep pembelajaran aktif, produktif menjadi isu yang dikembangkan. Konsep ini membimbing peserta didik untuk memikirkan cara memecahkan masalahnya sendiri (Problem Solving). (Insani 2019)

Pokok pikiran yang terdapat dalam kurikulum 1964 adalah pemerintah berkeinginan supaya rakyat mendapatkan pengetahuan akademik sejak jenjang sekolah dasar, dan pembelajaran yang diarahkan pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian dan jasmani (Azhar, 2020).

4. Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum 1968 identik dengan muatan mata pelajaran teoritis, tidak berkaitan dengan kehidupan nyata, metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum ini sangat tergantung oleh ilmu pendidikan dan psikologi pada akhir tahun 1960-an (Insani 2019). Pendidikan diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional serta pembangunan karakter kebangsaan.

5. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 merupakan kurikulum pengganti dari kurikulum 1973 yang memiliki dua prinsip yaitu menekankan pada efektivitas dan efisiensi, dan menganut pada pendekatan instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Menurut Mudjito, Direktur Pembinaan TK dan SD

Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO (management by objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), dikenal dengan istilah Satuan Pelajaran (SP), yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum ini menggunakan pendekatan sistem instruksional, di mana setiap proses pembelajaran disusun secara terencana mulai dari tujuan umum dan khusus, materi, metode, hingga evaluasi. Pendekatan ini menekankan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Kurikulum ini juga mengadopsi pendekatan integratif, di mana setiap mata pelajaran saling mendukung untuk mencapai tujuan pendidikan secara keseluruhan. Meskipun Kurikulum 1975 memperkenalkan paradigma baru yang lebih terstruktur dan terukur serta menggeser orientasi dari guru-sentris ke hasil belajar siswa, implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam kesiapan guru menyusun dan melaksanakan satuan pelajaran secara detail. Sistem penilaian dilakukan pada akhir setiap satuan pelajaran, berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1975 menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan Indonesia karena memperkenalkan pendekatan instruksional modern dan manajemen pendidikan yang sistematis, sekaligus menjadi dasar bagi pengembangan kurikulum berikutnya.

6. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 yang bertujuan pada instruksional yang didasari oleh pandangan bahwa memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dalam waktu yang terbatas sangat fungsional dan efektif. Ciri khusus yang dimiliki kurikulum 1984 adalah pendekatan pengajarannya yang berpusat pada peserta belajar secara aktif atau disebut dengan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Penyampaian materi tidak hanya dengan metode ceramah melainkan dengan metode lapangan agar proses belajar lebih efektif. Hubungan antara guru dan peserta didik mulai diarahkan ke pola interaksi dua arah.

Struktur kurikulum 1984 memperluas jumlah mata pelajaran inti menjadi enam belas, meliputi bidang agama, pendidikan moral Pancasila, sejarah perjuangan bangsa, bahasa dan kesusastraan Indonesia, geografi,

ekonomi, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, pendidikan jasmani, serta sejarah dunia dan nasional. Selain itu, kurikulum ini juga menambahkan mata pelajaran pilihan sesuai dengan jurusan masing-masing dan mengubah program jurusan menjadi program A dan B, dengan program A menekankan pada bidang akademik seperti fisika, biologi, ekonomi, dan bahasa, sedangkan program B lebih mengarah pada keterampilan kejuruan meskipun pada awalnya program B sempat ditiadakan karena keterbatasan sarana sekolah.

Kurikulum 1984 juga menekankan pendidikan sejarah perjuangan bangsa sebagai bidang yang berdiri sendiri dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang kuat. Meskipun kurikulum ini memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa untuk aktif dalam pembelajaran, implementasinya menghadapi tantangan, terutama dalam penerapan metode CBSA yang terkadang menimbulkan kegaduhan di kelas. Secara keseluruhan, Kurikulum 1984 berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyesuaikan isi dan metode pembelajaran agar lebih relevan dan kontekstual sesuai dengan tuntutan perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi Indonesia pada masa itu.

7. Kurikulum 1994

Kurikulum 1994 merupakan hasil revisi dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 1994 dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berdampak pada perubahan sistem semester ke sistem caturwulan. Karakteristik kurikulum 1994 diantaranya: menggunakan system caturwulan, materi pelajaran yang cukup padat, satu kurikulum untuk semua peserta didik, dominan pelajaran matematika dan bahasa serta minimnya pelajaran seni dan materi, pendidikan moral pancasila diubah menjadi PPKn.(Ananda and Hudaidah 2021). Meskipun disusun dengan niat baik untuk menyempurnakan sistem pendidikan, kurikulum ini sering kali dikritik karena terlalu padat dan membebani siswa, baik secara kognitif maupun psikologis.

Pendidikan pada masa ini lebih menekankan pada pengajaran bahasa Jepang, moral, dan pelajaran yang dianggap penting untuk mendukung administrasi dan kontrol Jepang atas wilayah Indonesia. Selain itu,

Jepang membuka kesempatan lebih luas bagi rakyat pribumi untuk mengenyam pendidikan dibandingkan masa kolonial Belanda, walaupun dengan tujuan yang masih sangat politis dan terbatas. Kurikulum ini juga berusaha menghapuskan sistem kasta yang membedakan akses pendidikan berdasarkan golongan sosial seperti yang terjadi pada masa kolonial Belanda. Namun, secara umum, kurikulum 1944 masih bersifat terbatas dan diarahkan untuk mendukung kepentingan penjajah Jepang, bukan untuk pengembangan pendidikan nasional Indonesia secara mandiri.

8. Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi / KBK)

Pada era ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI. Sebagai salah satu dampak dari laju reformasi adalah dibuatnya sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi” atau yang kerap disebut kurikulum KBK. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) atau kurikulum 2004 sebagai pengganti kurikulum 1994. Dalam kurikulum KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, melainkan menguasai keterampilan, sikap, minat, motivasi dan nilai-nilai sehingga mampu melakukan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kurikulum berbasis kompetensi (KBK) adalah suatu konsep pendekatan, strategi kurikulum yang menekankan pada penguasaan berbagai kompetensi tertentu. Peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan dan pemahaman, tetapi juga keterampilan, sikap, minat, motivasi dan nilai-nilai agar dapat melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (Insani, 2019)

- a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (learning outcomes) dan keberagaman;
- b. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif;
- c. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi;

- d. Struktur kompetensi dasar KBK ini dirinci dalam komponen aspek, kelas dan semester;
 - e. Keterampilan dan pengetahuan dalam setiap mata pelajaran, disusun dan dibagi menurut aspek dari mata pelajaran tersebut;
 - f. Pernyataan hasil belajar ditetapkan untuk setiap aspek rumpun pelajaran pada setiap level;
 - g. Perumusan hasil belajar adalah untuk menjawab pertanyaan, “Apa yang harus siswa ketahui dan mampu lakukan sebagai hasil belajar mereka pada level ini?”;
 - h. Hasil belajar mencerminkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas kurikulum dinyatakan dengan kata kerja yang dapat diukur dengan berbagai teknik penilaian;
 - i. Setiap hasil belajar memiliki seperangkat indikator. Perumusan indikator adalah untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana kita mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil belajar yang diharapkan?”
9. Kurikulum 2006 (KTSP - Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kurikulum Tingkat Satuan (KTSP) atau disebut dengan kurikulum 2006 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. KTSP sering disebut sebagai penyempurnaan dari KBK. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan. Dan selanjutnya dengan terbitnya permen nomor 24 tahun 2006, lahir lah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Menurut Kunandar dalam bukunya Abdullah Idi, karakteristik pembelajaran dalam KTSP adalah sebagai berikut: (Insani, 2019) a. KTSP menuntun siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan,

minat, bakat yang akhirnya akan membentuk siswa yang mempunyai kemandirian dan ketrampilan; b. KTSP berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan; c. Strategi pembelajaran yang digunakan beraneka ragam; d. Sumber belajar bukan hanya guru namun bisa teman sekelasnya, buku-buku film yang mengandung edukasi; e. Penilaian dilihat dari proses dan hasilnya pada suatu target pencapaian kompetensi

10. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum 2013 merupakan perbaikan dari kurikulum KTSP karena dianggap belum sempurna terutama diakibatkan kemajuan teknologi maka KTSP diubah menjadi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pembentukan karakter agar terlahirnya insan yang produktif, inovatif, kreatif dan berkarakter. Pendekatan saintifik yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 adalah mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan (Azhar 2020). Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: (Insani, 2019) a. Mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif dan psikomotor; b. Siswa menerapkan apa yang sudah di dapat disekolah dalam kehidupannya sehari-hari; c. Kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar; d. Kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron; e. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horisontal dan vertikal).

Kurikulum 2013 edisi revisi merupakan hasil dari perbaikan kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun ajaran 2015/2016, yang mana perbaikan ini memiliki tiga kompetensi yaitu sikap, keterampilan dan pengetahuan. Dalam K13 edisi revisi memiliki empat point adalah 1) Penataan Kompetensi Sikap Spiritual dan Sikap Sosial pada semua mata pelajaran. Sebelumnya di kurikulum 2013 lama, terdapat kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada Sikap Spiritual dan Sikap Sosial. 2) Koherensi KI-KD dan penyelarasan dokumen. Sebelumnya di kurikulum 2013 lama, terdapat ketidakselarasan antara KI-KD dengan silabus dan buku. 3) Pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013 Edisi Revisi. Sebelumnya di

kurikulum 2013 lama, penerapan proses berpikir 5M sebagai metode pembelajaran yang bersifat prosedural dan mekanistik. 4) Penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Sebelumnya di kurikulum 2013 lama, terdapat pembatasan kemampuan siswa melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang (Hanissya 2017).

11. Kurikulum Merdeka (2022–sekarang)

Kurikulum Merdeka merupakan program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada siswa-siswi. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apa pun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi (Hr & Wakia, 2021). Karakteristik kurikulum merdeka adalah sebagai berikut: (Kemendikbud 2023)

- a. Pengembangan soft skill dan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar pancasila,
- b. Fokus pada materi esensial relevan, dan mendalam sehingga terciptanya waktu untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi,
- c. Pembelajaran yang fleksibel yang mana guru melakukan pembelajaran yang sesuai dengan capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan menyesuaikan dengan konteks muatan lokal

Kurikulum merdeka ini guru dituntut lebih kreatif dalam merancang modul ajar, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sehingga seorang guru tidak dapat lagi sembarangan dalam pembuatan RPP guna merancang KBM dalam setiap pekan. Karakteristik utama dari kurikulum merdeka belajar yaitu pembelajaran berbasis proyek sebagai pengembangan soft skill dan sesuai dengan karakter pelajar Pancasila, fokus pada materi esensial agar terdapat waktu yang cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan

numerasi, fleksibilitas untuk guru melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks muatan lokal (Idhartono, 2022).

Kurikulum Merdeka dibagi menjadi 3, yaitu: (Jannah et al., 2022) (1) Kegiatan belajar tetap menggunakan K13 dengan paradigma baru (visi dan misi) harus menyampaikan kesiapan siswa dalam belajar; (2) Cara mengajar menggunakan paradigma belajar dengan berbasis pada peserta didik sehingga tidak lagi berbasis pada materi; (3) Merdeka berubah dalam proses pembelajaran yang tidak menuntut peserta didik untuk tuntas pada semua materi pembelajaran (disesuaikan dengan bakat dan minat).

B. FAKTOR PENYEBAB PERUBAHAN KURIKULUM

Perubahan kurikulum merupakan keniscayaan dalam dunia pendidikan yang dinamis. Perubahan ini mencerminkan upaya untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan berbagai tantangan internal maupun eksternal. Beberapa faktor utama yang mendorong terjadinya perubahan kurikulum di Indonesia antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah

Setiap pergantian pemerintahan membawa visi, misi, dan arah pembangunan pendidikan yang berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi perumusan dan implementasi kurikulum nasional.

Pemerintah baru cenderung memiliki prioritas dan tujuan pendidikan yang disesuaikan dengan visi dan misi mereka, misalnya menekankan penguatan karakter, penguasaan teknologi, atau peningkatan daya saing global. Hal ini kemudian direspons melalui evaluasi terhadap kurikulum yang sedang berjalan, dan jika ditemukan ketidaksesuaian, maka dilakukan revisi, pembaruan, atau bahkan penggantian kurikulum agar selaras dengan arah pembangunan yang diinginkan.

Perubahan kurikulum tersebut diikuti dengan berbagai penyesuaian di lapangan, seperti pelatihan guru, penyusunan buku teks baru, serta penyesuaian sistem evaluasi pembelajaran. Contoh nyata dapat dilihat di Indonesia, di mana setiap pergantian presiden atau menteri pendidikan seringkali diikuti perubahan kurikulum, seperti dari Kurikulum 1994 ke

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004, lalu ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, kemudian ke Kurikulum 2013, hingga Merdeka Belajar. Setiap perubahan tersebut merupakan upaya menyesuaikan sistem pendidikan dengan visi, misi, dan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, sehingga kurikulum nasional tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

2. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan dalam berbagai disiplin ilmu serta revolusi digital menuntut kurikulum yang mampu menyesuaikan diri agar materi pembelajaran tetap relevan dan kontekstual.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompleks dan dinamis mengharuskan materi pembelajaran selalu diperbarui agar siswa memperoleh pengetahuan yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, revolusi digital membawa perubahan besar dalam cara belajar dan mengakses informasi, sehingga kurikulum harus mampu mengintegrasikan keterampilan digital serta literasi teknologi agar peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan yang semakin digital dan terhubung. Dengan demikian, kurikulum yang relevan dan kontekstual akan membantu siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan menghadapi tantangan masa depan

3. Tuntutan Dunia Kerja

Perubahan struktur dan kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompleks menuntut lulusan pendidikan untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan tuntutan pasar kerja. Dunia kerja saat ini mengharuskan para tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan cepat, memiliki keterampilan praktis, serta mampu berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah.

Sistem pendidikan harus menyiapkan lulusan yang siap menghadapi tantangan nyata di lapangan kerja, dengan bekal kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi. Kurikulum yang dirancang harus mampu mengintegrasikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja, agar lulusan tidak hanya mampu bersaing secara lokal, tetapi juga di tingkat global.

4. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk orientasi pendidikan serta menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh kurikulum. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan identitas bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat.

Oleh karena itu, kurikulum harus mampu mencerminkan dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut agar peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kesadaran budaya, dan pemahaman agama yang kuat. Dengan demikian, pendidikan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan mampu hidup harmonis dalam keberagaman sosial dan budaya. Integrasi nilai-nilai sosial, budaya, dan agama dalam kurikulum juga membantu menjaga kelestarian tradisi dan memperkuat jati diri bangsa di tengah arus globalisasi.

5. Evaluasi terhadap Kurikulum Sebelumnya

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya sering kali mengungkap adanya celah atau ketidaksesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai di lapangan. Hal ini berarti bahwa meskipun kurikulum dirancang dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan kompetensi siswa atau mengembangkan karakter, implementasinya belum sepenuhnya berhasil mencapai target tersebut.

Ketidaksesuaian ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti metode pembelajaran yang kurang efektif, kurangnya sumber daya pendukung, atau ketidaksiapan guru dalam mengaplikasikan kurikulum secara optimal. Selain itu, perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja yang cepat juga dapat membuat materi kurikulum menjadi kurang relevan jika tidak diperbarui secara berkala. Oleh karena itu, evaluasi ini menjadi sangat penting sebagai dasar untuk melakukan revisi atau pembaruan kurikulum agar lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mampu menjawab tantangan pendidikan secara efektif. Dengan demikian, proses evaluasi membantu memastikan bahwa kurikulum tidak

hanya menjadi dokumen formal, tetapi benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

6. Tuntutan Globalisasi

Globalisasi membawa dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan. Dalam konteks ini, sistem pendidikan nasional dituntut untuk menyesuaikan standar mutu dan kompetensi peserta didik agar mampu bersaing secara internasional. Hal ini berarti bahwa kurikulum, metode pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar harus dirancang sedemikian rupa sehingga lulusan tidak hanya unggul di tingkat nasional, tetapi juga memiliki kemampuan yang diakui dan dibutuhkan di kancah global.

Kompetensi yang dimaksud meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing, keterampilan berpikir kritis, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Penyesuaian ini penting agar peserta didik dapat menghadapi persaingan global yang semakin ketat dan mampu mengambil peran aktif dalam berbagai bidang, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, globalisasi memaksa sistem pendidikan nasional untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya agar tidak tertinggal dalam persaingan dunia yang semakin terbuka dan kompetitif.

BAB IV

PELAKU DAN PROSES

ADMINISTRASI KURIKULUM

A. PERAN GURU DALAM ADMINISTRASI KURIKULUM

Peranan kurikulum sangatlah penting bagi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, ada tiga peranan kurikulum sebagai berikut:(Achruh 2022)

a. Peranan Konservatif

Kurikulum memiliki tanggung jawab dalam mentransmisikan warisan sosial kepada generasi muda.

b. Peranan Kritis atau evaluative

Kurikulum ikut serta aktif berpartisipasi dalam mengontrol sosial dan menekankan unsur berpikir kritis yang mana lembaga pendidikan tidak hanya semata-mata mewariskan kebudayaan yang ada melainkan menilai dan memilih unsur budaya yang akan di wariskan.

c. Peranan Kreatif

Kurikulum memnciptakan sesuatu yang baru sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang dan yang akan datang dalam masyarakat dengan cara menciptakan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif.

Peran diartikan sebagai tugas yang dijalankan oleh seseorang dalam lingkungan tertentu. Menurut Kozier Barbara, Peran adalah serangkain perilaku yang dapat diharapkan oleh orang lain berdasarkan posisi seseorang dalam system. Menurut Sri Herlina bahwa disekolah, guru berada dalam kegiatan administrasi sekolah (Purnama, 2023). Sekolah harus melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan lulusan dengan jumlah dan mutu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam lingkup administrasi pendidikan inilah peran guru sangatlah penting untuk mencerdaskan peserta didik. guru ialah orang yang memberi ilmu kepada siswanya. Kemudian guru dalam pandangan masyarakat adalah

seseorang yang mendidik di suatu tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah dan sebagainya. dapat disimpulkan bahwa peran guru adalah seseorang yang memiliki peranan atau tanggung jawab penting dalam mengimplementasikan kurikulum yang telah dirancang pemerintah untuk dilaksanakan di setiap sekolah demi mencapai suatu tujuan pendidikan yang diharapkan (Selpiani 2023).

Guru berperan sangat penting dalam menetapkan kebijakan sekaligus melaksanakan semua proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan, penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah dan keuangan hingga hubungan sekolah dengan masyarakat (Soetjipto. 2009).

Itulah mengapa guru harus aktif memberikan tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang bersifat kolaboratif yang artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerja sama (tidak individual). Oleh karena itu semua personel sekolah termasuk guru harus terlibat dalam proses administrasi pendidikan. Berikut dijelaskan beberapa peran penting guru dalam implementasi administrasi kurikulum:

1. Implementer (Pelaksana)

Implementer merupakan anggota tim yang berorientasi pada tindakan dan mempertahankan keteraturan dalam lingkungan, dimana seorang guru merupakan salah satu anggota yang berjasa dalam terealisasinya kurikulum di sekolah. Guru sebagai tenaga pendidik menerapkan pengaplikasian dari kurikulum yang sudah dirancang. Guru hanya berperan sebagai penggerak kurikulum yang telah dirancang.

2. Adapters (Adaptor/Penyelaras)

Guru tidak hanya berperan sebagai pelaksana kurikulum tetapi ia juga memiliki peran lain yakni sebagai penyelaras kurikulum dengan memperhatikan hal yang menjadi kebutuhan pendidikan di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, guru juga mempunyai tugas untuk memodifikasi kurikulum yang telah dirancang dengan memperhatikan karakteristik setiap siswanya dan seperti apa kebutuhan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.

3. Developers (Pengembang)

Guru berperan sebagai pengembang sepenuhnya, guru memiliki wewenang untuk mendesain kurikulum dan menentukan strategi apa yang harus dikembangkan beserta dengan evaluasinya. Guru dapat mengembangkan kurikulum dengan melihat atau memperhatikan seperti apa kebutuhan dan karakteristik setiap siswa, visi, misi kurikulum dan menyesuaikan dengan pengalaman belajar siswa sebelumnya. Pengembangan ini dapat dilakukan oleh seorang guru dengan tanpa mengurangi sedikitpun isi dan tujuan dari kurikulum yang telah ditetapkan.

4. Reasearchers (Peneliti)

Sebagai guru yang profesional, guru berperan sebagai peneliti yang mempunyai peran untuk melakukan uji segala komponen kurikulum, dimana seorang guru harus mencari tau bagaimana implementasi kurikulum itu terlaksana dengan baik di sekolah, jika terjadi kesalahan atau ketidak sesuaian antara implementasi dengan isi maka harus ada perbaikan kurikulum demi menunjang keberhasilan Pendidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka guru mempunyai peran yang sangat penting dalam pengimplementasian kurikulum, yakni:

1. Pengelolaan administrasi.
2. Mengelola bimbingan konseling kepada peserta didik dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik.
3. Menjadi tenaga pendidik yang baik di sekolah.
4. Ikut andil dalam melakukan pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
5. Meningkatkan keberhasilan sistem instruksional.
6. Pendekatan kurikulum.
7. Meningkatkan pemahaman konsep diri.
8. Memupuk hubungann yang harmonis dengan siswa agar guru dapat mudah memahami setiap perbedaan yang ada pada peserta didik(hidayat, 2023)

B. PROSES ADMINISTRASI KURIKULUM (PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN, EVALUASI)

Administrasi kurikulum adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara sistematis agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Proses ini dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam satuan pendidikan dengan tanggung jawab dan peran masing-masing. Secara umum, proses administrasi kurikulum terdiri atas empat tahap utama:

1. Perencanaan (*Planning*)

Tahap awal ini mencakup penetapan tujuan pembelajaran, penyusunan program tahunan dan semester, pengembangan silabus, serta penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Proses ini dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama tim pengembang kurikulum dan para guru. Langkah langkah perencanaan yaitu

- 1) analisis kebutuhan
- 2) merumuskan dan menjawab pertanyaan filosofi
- 3) menentukan desain kurikulum,
- 4) membuat rencana induk: pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian (Syafaruddin and Amiruddin:2017)

Perencanaan kurikulum yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional di tingkat pusat meliputi hal-hal berikut.

- 1) Penyusunan program dan pengembangan kurikulum yang terdiri atas: landasan, program dan pengembangan kurikulum; garis-garis besar program pengajaran; dan pedoman pelaksanaan kurikulum.
- 2) Penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kurikulum. Hal ini seperti pedoman penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas guru, penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pengajaran dan pedoman penyusunan persiapan pengajaran.

Perencanaan kurikulum yang akan digunakan di sekolah seperti kurikulum tingkat satuan pendidikan harus berlandaskan kepada Pancasila sebagai falsafah negara dan Undang-undang Dasar 1945 yang mengamatkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk merumuskan kurikulum hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam pengembangan dan perumusan kurikulum itu sendiri, yaitu:

- a) Prinsip relevansi
Kurikulum harus relevan antara pendidikan yang diterima dengan permasalahan di lingkungan masyarakat. Di sini guru berperan memberikan materi dan pengalaman mengajar kepada siswa yang dapat diterapkan di kehidupan artinya.
 - b) Prinsip efektif
Prinsip ini berhubungan dengan cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan implementasi kurikulum di kelas. Sedangkan untuk siswa berkaitan dengan cara mereka memahami pelajaran. Menurut Hamalik, Kamal, dan Muktiana, prinsip efektivitas mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan dengan tepat, baik secara kualitas maupun kuantitas
 - c) Prinsip efisiensi
Prinsip efisiensi berhubungan dengan tenaga, waktu serta biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang memuaskan. Kurikulum yang dibuat haruslah seefisien mungkin, dimana dalam pelaksanaannya harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya rendah. Kurikulum yang ada tidak boleh memberatkan pihak yang melaksanakannya.
 - d) Prinsip kontinuitas
Prinsip kontinuitas dalam pengembangan kurikulum memiliki makna sebagai penyusunan pedoman pengajaran harus direncanakan secara proporsional antara program materi yang akan diajarkan dengan aspek perilaku.
 - e) Prinsip fleksibilitas.
Kurikulum harus bersifat luwes bukan statis karena harus mengikuti tuntutan dan keadaan saat ini.
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
- Pengorganisasian (*Organizing*) meliputi pengaturan struktur pembelajaran, distribusi tugas guru, penjadwalan kegiatan pembelajaran, serta penyediaan sumber daya pembelajaran. Tujuannya adalah menciptakan sistem kerja yang efisien dan terstruktur. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler, sebagai berikut:

- a. Pembagian tugas mengajar dan tugas lain perlu dilakukan secara merata, sesuai dengan bidang keahlian dan minat guru. Diupayakan setiap guru memperoleh jam tugas sesuai dengan beban tugas minimal. Pemerataan beban tugas akan menumbuhkan rasa kebersamaan. Pemberian tugas yang sesuai dengan keahlian dan minat akan meningkatkan motivasi kerja guru. Memperoleh tugas sesuai dengan beban minimal akan membuat guru merasa aman dan dapat naik pangkat dengan tepat waktu.
 - b. Penyusunan jadwal pelajaran diupayakan agar guru mengajar maksimal 5 hari/minggu, sehingga ada 1 hari tidak mengajar untuk pertemuan MGMP. Setiap hari sebaiknya guru tidak mengajar lebih dari 6 jam, sehingga ada waktu istirahat.
 - c. Penyusunan jadwal pola kegiatan perbaikan dan pengayaan secara normal setiap mata pelajaran akan memerlukan kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas penugasan terhadap bahan ajar. Oleh karena itu, ketika menyusun jadwal pelajaran sudah harus dialokasikan waktu untuk kegiatan perbaikan bagi siswa yang belum tuntas dan pengayaan bagi yang sudah tuntas.
 - d. Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler perlu difokuskan untuk mendukung kegiatan kurikuler dan kegiatan lain yang mengarah, pada pembentukan keimanan/ketakwaan, kepribadian, dan kepemimpinan dengan keterampilan tertentu.
 - e. Penyusunan jadwal penyegaran guru. Guru secara periodik perlu mendapatkan penyegaran tentang perkembangan iptek maupun metode mengajar. Penyegaran perlu dijadwalkan, dengan memanfaatkan waktu-waktu libur sekolah.
3. Pelaksanaan (*Actuating*)
- Merupakan proses penerapan kurikulum di dalam kelas oleh guru melalui kegiatan belajar-mengajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola proses pembelajaran dengan metode dan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Langkah-langkah pelaksanaan (Sukatin:2021) yaitu:
- a. Menyusun rencana silabus dan RPP
 - b. Menjabarkan materi

- c. Penentuan strategi dan metode belajar,
 - d. Menyediakan sumber, alat dan alat penilaian proses dan hasil belajar,
 - e. Penentuan cara dan alat penilaian proses dan hasil belajar, dan
 - f. Pengaturan lingkungan pembelajaran.
4. Evaluasi (Evaluating)

Dilakukan untuk mengukur keberhasilan implementasi kurikulum serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan tim penjamin mutu pendidikan melalui supervisi, analisis hasil belajar, dan umpan balik dari berbagai pihak.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum dilakukan melalui 2 cara yaitu:

- 1) Melalui evaluasi hasil belajar

Tujuan dan fungsi evaluasi hasil belajar adalah

 - (a) Memberikan umpan balik pada guru dan siswa dengan tujuan memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi siswa.
 - (b) Memberikan informasi pada siswa tentang Tingkat keberhasilannya dalam belajar dengan tujuan memperbaiki mendalami atau memperluas pelajarannya.
 - (c) Menentukan nilai hasil belajar siswa yang dibutuhkan untuk pemberian laporan pada siswa, penentuan kenaikan kelas dan kelulusan siswa.
- 2) Melalui Evaluasi Program pengajaran

Evaluasi program pengajaran merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau yang menghambat keberhasilan program tersebut.

Dasar-dasar Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum bermacam-macam tujuannya, yang paling penting diantaranya yaitu:

 - (a) Mengetahui hingga manakah siswa mencapai kemajuan kearah tujuan yang telah ditentukan.
 - (b) Melalui efektivitas kurikulum.

- (c) Menentukan faktor biaya, waktu dan tingkat keberhasilan kurikulum.

Sering kita lihat bahwa kurikulum dirombak tanpa evaluasi yang sistematis. Jika evaluasi diadakan secara terus-menerus mungkin tak perlu kurikulum diganti seluruhnya, akan tetapi dapat senantiasa di perbaiki dan disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan zaman

BAB V

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

A. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum tidak hanya bergantung pada desain atau kontennya, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang saling terkait. Beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Guru

Kualitas guru dalam aspek pedagogik dan profesional menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembelajaran. Guru yang kompeten mampu menerjemahkan kurikulum ke dalam proses pembelajaran yang bermakna. Adapun kompetensi guru yaitu kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak. Kompetensi guru berkaitan dengan profesionalisme yaitu, guru yang professional adalah guru yang kompeten, karena itu kompetensi profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Dengan kata lain kompetensi adalah pemilihan, penguasaan, ketrampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Jadi kompetensi professional guru adalah suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pengetahuan tentang pemahaman dan pembelajaran, kurikulum, serta perkembangan manusia termasuk gaya belajar. Pada umumnya sekolah-sekolah yang memiliki guru dengan kompetensi professional akan menerapkan

pembelajaran dengan melakukan, untuk menggantikan cara mengajar dimana guru hanya berbicara dan peserta didik hanya mendengarkan.

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah

Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan memiliki peran strategis dalam mengarahkan, memotivasi, dan mendukung guru dalam menjalankan kurikulum secara optimal. Beberapa Gambaran pribadi kepala sekolah yang professional:

Pertama, menyukai perubahan. Seorang kepala sekolah harus memiliki ketertarikan untuk melihat dan melakukan transformasi menuju kondisi yang lebih optimal. Langkah ini diambil demi kemajuan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus berusaha untuk meningkatkan prestasi sekolah dari situasi yang ada sebelumnya.

Kedua, bersikap proaktif dan senang menciptakan peluang. Adanya atau tidaknya peluang tergantung pada sudut pandang seseorang. Dalam hal ini, ia menjadi teladan bagi para guru dalam bersikap proaktif dan tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan masalah, apalagi membiarkan masalah tersebut muncul tanpa penanganan, karena hal itu dapat berkembang menjadi masalah besar dan berdampak negatif terhadap keseluruhan proses belajar mengajar di sekolah.

Ketiga, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Kepala sekolah juga perlu mempertimbangkan dengan matang sebelum mengeluarkan pernyataan agar tidak menyebabkan kebingungan dan menjaga suasana tetap kondusif di sekolah.

Keempat, menghargai profesi para guru. Kepala sekolah adalah seorang guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, untuk itu dia harus memiliki jiwa guru yang baik serta memahami dengan baik seluruh warga sekolahnya dan memperlakukannya sesuai harkat dan martabatnya. Semua kebijakannya akan berujung pada upaya untuk membuat guru betah dan menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan suasana kerja yang positif.

Kelima, memprioritaskan proses pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah berkonsentrasi pada program sekolah yang ditetapkan seperti kegiatan pembelajaran, peningkatan mutu lulusan, studi lanjut

para alumni, kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan ilmiah, spiritual, olahraga, kesenian dan sebagainya. Sekolah yang baik adalah sekolah yang bisa menyelenggarakan program sesuai jenis dan karakter sekolah tersebut. Kepemimpinan yang efektif juga dapat memotivasi guru untuk berinovasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah perlu memberikan penghargaan dan dukungan agar guru merasa dihargai dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh manajemen juga penting untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta mencari solusi bersama.

3. Sumber, Sarana dan Prasarana

Ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai akan menunjang efektivitas proses belajar-mengajar dan mendukung implementasi kurikulum secara menyeluruh. Fasilitas dan sumber belajar tersebut diantaranya adalah ruang belajar dan peralatan yang memadai seperti meja, kursi, LCD, dan sebagainya. Disamping itu sumber belajar seperti buku-buku sumber utama, buku penunjang yang lain harus tersedia secara cukup dan senantiasa up date menyesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Beberapa kasus yang sering terjadi adalah kurang tersedianya sumber belajar di kebanyakan sekolah ataupun keterlambatan pengadaan sumber belajar dapat menghambat proses pembelajaran. Untuk itu setiap sekolah hendaknya mengusahakan dan memiliki perpustakaan sekolah yang representatif bagi keperluan warga sekolah terutama para peserta didik.

Selain itu yang sangat penting bagi peningkatan ketreampilan siswa di dalam mempraktekkan teori yang dipelajari adalah laboratorium. Alatan praktikum hendaknya tersedia secara cukup di setiap laboratorium sekolah sehingga seluruh siswa dapat memperoleh kesempatan melakukan praktikum secara mendalam. Kualitas sarana dan prasarana sangat dipengaruhi oleh alokasi anggaran dan kebijakan sekolah maupun pemerintah. Jika anggaran pendidikan memadai dan digunakan dengan tepat, sarana yang diperlukan dapat disediakan dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan sarana prasarana harus dilakukan secara matang agar sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kondisi sekolah. Singkatnya, sarana dan prasarana pendidikan menjadi tulang punggung yang membantu proses implementasi kurikulum

berjalan dengan lancar dan efektif. Kurikulum yang baik pun tidak akan berhasil tanpa dukungan fasilitas yang memadai. Karena itu, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan.

4. Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua

Orang tua dan masyarakat merupakan mitra strategis dalam pendidikan yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Dukungan orang tua dalam bentuk perhatian, motivasi, dan penyediaan lingkungan belajar yang kondusif di rumah akan memperkuat proses belajar anak. Anak yang mendapat dukungan dari keluarganya cenderung memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dan mampu menghadapi tantangan pembelajaran dengan lebih baik. Selain itu, partisipasi masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat dapat membantu sekolah dalam penyediaan sarana prasarana, pembinaan siswa, maupun kegiatan ekstrakurikuler.

Masyarakat yang aktif mendukung sekolah akan menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Hal ini juga dapat memperkuat relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga keluarga dan masyarakat luas. Keterlibatan orang tua dalam rapat sekolah, komunikasi dengan guru, dan pemantauan perkembangan anak sangat penting agar masalah yang muncul dapat segera diatasi. Dukungan moral dan perhatian dari orang tua dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dan mendorong prestasi belajar mereka.

5. Motivasi dan Kesiapan Peserta Didik

Antusiasme, kesiapan mental, dan kemampuan belajar siswa sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum. Peserta didik merupakan unsure utama dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran diukur dengan ada tidaknya peningkatan atau perkembangan aspek mental, intelektual, sikap dan keterampilan anak didik.

Motivasi belajar siswa menjadi kunci utama dalam keberhasilan proses pembelajaran. Siswa yang termotivasi cenderung aktif mengikuti pembelajaran, berpartisipasi, dan berusaha mencapai hasil belajar yang

baik. Sebaliknya, siswa yang kurang motivasi akan sulit meraih tujuan kurikulum. Oleh karena itu, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang mampu memotivasi siswa sesuai karakteristik mereka. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga mempengaruhi kondisi peserta didik. Misalnya, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu atau lingkungan yang kurang mendukung pendidikan mungkin menghadapi kesulitan dalam belajar. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari sekolah melalui program bantuan dan pendampingan agar siswa tetap bisa mengikuti kurikulum dengan baik.

6. Komite Sekolah

Dalam fungsinya sebagai partner sekolah, komite sekolah tidak saja bekerja sama dengan sekolah dalam rangka menyusun rencana anggaran dan kegiatan sekolah, mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekolah terutama menyangkut pengadaan anggaran yang berkaitan dengan bangunan fisik tetapi lebih dari pada itu, komite sekolah sekaligus merupakan wakil dari seluruh anggota komite yang hendak memperjuangkan keinginan wali murid agar sekolah menyediakan layanan pendidikan yang layak sesuai dengan keinginan dan harapan wali murid dan peserta didik.

Peran komite sekolah juga sangat penting dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana, penggalangan dana, serta menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat. Komite dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan mengusahakan solusi secara bersama-sama dengan pihak sekolah. Dukungan komite yang kuat membantu meringankan beban sekolah dalam menghadapi berbagai kendala, baik administrasi maupun sumber daya.

7. Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif dapat menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh.

Kondisi fisik yang baik, misalnya ruang kelas yang terang, bersih, dan memiliki ventilasi yang cukup, akan meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan siswa. Fasilitas pendukung seperti taman, lapangan olahraga, dan area rekreasi juga berkontribusi pada keseimbangan belajar dan istirahat siswa, sehingga mereka dapat berkembang secara holistik.

Lingkungan yang sehat juga mengurangi risiko gangguan kesehatan yang dapat menghambat proses belajar.

Selain aspek fisik, hubungan sosial antar siswa dan antara guru dengan siswa sangat mempengaruhi iklim psikologis sekolah. Lingkungan yang penuh rasa saling menghormati, kerja sama, dan bebas dari intimidasi atau bullying akan menciptakan suasana belajar yang positif. Guru yang mampu membangun hubungan baik dengan siswa juga membantu menciptakan motivasi belajar yang tinggi dan mengurangi konflik di sekolah. Lingkungan sekolah juga mencakup hubungan dengan masyarakat sekitar. Sekolah yang mampu menjalin kerja sama dengan lingkungan sosial dan budaya di sekitarnya dapat menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang relevan.

8. Kebijakan Pendidikan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kurikulum nasional, standar kompetensi lulusan, serta pedoman pelaksanaan pembelajaran yang harus diikuti oleh semua sekolah. Kebijakan ini menjadi dasar hukum dan acuan utama dalam implementasi kurikulum di tingkat sekolah

Selain itu, pemerintah bertanggung jawab menyediakan anggaran dan sumber daya pendidikan yang memadai agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik. Alokasi dana untuk pelatihan guru, pengadaan buku dan alat peraga, serta pembangunan sarana prasarana menjadi salah satu bentuk dukungan kebijakan. Tanpa adanya dukungan kebijakan dan anggaran yang cukup, sekolah akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kurikulum secara optimal. Kebijakan pemerintah juga mencakup supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum melalui dinas pendidikan dan lembaga terkait. Pengawasan yang ketat dan sistem evaluasi yang terstruktur membantu memastikan sekolah menjalankan kurikulum sesuai standar dan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong inovasi dan adaptasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi.

B. STRATEGI PENGEMBANGAN ADMINISTRASI KURIKULUM

Administrasi kurikulum yang baik menuntut adanya strategi pengembangan yang terencana dan berkesinambungan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan kurikulum tidak hanya menjadi kegiatan rutin administratif, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Strategi pengembangan administrasi kurikulum harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, pengawas, hingga pemerintah pusat dan daerah. Strategi tersebut mencakup aspek manajerial, profesionalisme, penggunaan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor.

1. Peningkatan Kompetensi Guru dalam Administrasi Kurikulum

Guru memiliki peran sentral dalam pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, strategi utama dalam pengembangan administrasi kurikulum adalah melalui peningkatan kompetensi guru. Guru perlu dibekali dengan pemahaman mendalam tentang penyusunan perangkat ajar, pelaksanaan pembelajaran yang aktif, serta evaluasi yang objektif.

Beberapa langkah konkret:

- Pelatihan rutin dan berjenjang terkait penyusunan RPP, silabus, dan asesmen.
- Workshop pengembangan kurikulum berbasis karakter, kearifan lokal, dan pendidikan abad 21.
- Pemberian insentif bagi guru inovatif dalam implementasi kurikulum.

2. Penguatan Manajemen Sekolah dan Kepemimpinan Akademik

Kepala sekolah sebagai pemimpin akademik memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberjalanan kurikulum secara sistematis. Oleh karena itu, strategi pengembangan mencakup:

- Pelatihan kepemimpinan kurikulum bagi kepala sekolah dan wakil kurikulum.
- Supervisi berkala terhadap proses pembelajaran.
- Penguatan budaya mutu dan perencanaan berbasis data.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Administrasi Kurikulum

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi menjadi strategi penting untuk mengembangkan administrasi kurikulum. Hal ini mencakup:

- Penggunaan platform manajemen pembelajaran (LMS) seperti Google Classroom, Moodle, atau SIMPKB.
 - Pemanfaatan aplikasi e-RKAS, e-Rapor, dan sistem data dapodik untuk sinkronisasi kurikulum.
 - Digitalisasi dokumen administrasi guru (RPP, jurnal, evaluasi).
4. Pengembangan Kurikulum yang Responsif terhadap Kebutuhan Lokal dan Global
- Strategi berikutnya adalah pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan lokal, nasional, dan global. Kurikulum tidak hanya harus selaras dengan tuntutan nasional, tetapi juga:
- Mengintegrasikan isu global seperti SDGs, pendidikan lingkungan, dan kewirausahaan.
 - Menyesuaikan dengan budaya, potensi lokal, dan kearifan masyarakat setempat.
 - Mendorong implementasi Kurikulum Merdeka yang memberi ruang diferensiasi pembelajaran.
5. Penguatan Kolaborasi antara Sekolah, Komite, dan Masyarakat
- Pengembangan kurikulum tidak dapat dilakukan secara individual oleh sekolah. Harus ada keterlibatan:
- Komite sekolah dalam menyusun kebijakan dan mendukung sarana pembelajaran.
 - Dunia usaha dan industri dalam kurikulum vokasi atau penguatan soft skills.
 - Masyarakat melalui program pendidikan berbasis proyek (*Project-Based Learning*).
6. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
- Pengembangan kurikulum harus terus dievaluasi untuk menjamin kualitas dan relevansinya. Langkah strategis dalam evaluasi administrasi kurikulum mencakup:
- Evaluasi berbasis data dari hasil asesmen nasional, AKM, dan survei karakter.
 - Refleksi pembelajaran oleh guru dan kepala sekolah setiap semester.
 - Audit kurikulum oleh pengawas atau lembaga eksternal secara periodik.

7. Inovasi dan Eksperimen Kurikulum

Sekolah perlu diberi ruang untuk mencoba pendekatan baru dalam implementasi kurikulum. Inovasi bisa mencakup:

- Integrasi kurikulum tematik lintas mata pelajaran.
- Pembelajaran berbasis komunitas atau lingkungan nyata.
- Pelibatan siswa dalam menyusun agenda belajar melalui student voice.

8. Evaluasi Dampak dan Efektivitas Strategi

Pengembangan strategi administrasi kurikulum yang baik tidak cukup hanya berhenti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Justru, evaluasi merupakan tahap krusial untuk mengukur sejauh mana strategi yang telah dirancang berhasil mencapai tujuannya. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui keberhasilan implementasi, mengidentifikasi kelemahan, serta memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kurikulum secara berkelanjutan (continuous improvement). Evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dampak strategis terhadap pembelajaran, profesionalisme guru, dan kepuasan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan.

Berikut adalah tiga parameter utama dalam mengevaluasi dampak dan efektivitas strategi administrasi kurikulum:

1. Peningkatan Hasil Belajar Siswa:

Salah satu indikator keberhasilan strategi pengembangan administrasi kurikulum adalah adanya peningkatan hasil belajar siswa. Hasil belajar mencerminkan efektivitas dari proses pembelajaran yang didasarkan pada kurikulum yang dirancang dan diadministrasikan dengan baik.

a. Indikator yang dapat dinilai:

- 1) Nilai rapor siswa dari semester ke semester.
- 2) Hasil Ujian Sekolah, Asesmen Nasional (AN), dan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).
- 3) Kemampuan siswa dalam berpikir kritis, pemecahan masalah, dan berkomunikasi.

b. Dampak positif strategi yang berhasil:

- 1) Siswa lebih memahami materi karena metode pembelajaran lebih kontekstual dan adaptif.

- 2) Adanya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran karena strategi pengajaran lebih inovatif.
 - 3) Pembelajaran menjadi lebih bermakna karena disesuaikan dengan gaya belajar dan potensi masing-masing siswa.
2. Kepuasan Warga Sekolah terhadap Pelaksanaan Kurikulum
- Kepuasan warga sekolah meliputi guru, siswa, orang tua, dan tenaga kependidikan juga menjadi tolok ukur penting dari keberhasilan implementasi strategi pengembangan administrasi kurikulum.
- 1) Cara mengukur:
 - a) Survei kepuasan terhadap sistem pembelajaran dan administrasi kurikulum.
 - b) Forum diskusi warga sekolah seperti rapat komite atau musyawarah guru.
 - c) Wawancara mendalam atau FGD (Focus Group Discussion) terhadap stakeholder pendidikan.
 - 2) Aspek yang dinilai dalam kepuasan warga sekolah:
 - a) Kesesuaian isi kurikulum dengan kebutuhan siswa.
 - b) Kelengkapan dan kemudahan penggunaan dokumen pembelajaran (RPP, modul ajar, evaluasi).
 - c) Dukungan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum.
3. Tingkat Kemandirian Guru dalam Merancang Pembelajaran
- Strategi pengembangan administrasi kurikulum yang baik harus mampu mendorong guru menjadi pribadi yang mandiri dan kreatif dalam merancang pembelajaran. Guru tidak lagi hanya bergantung pada instruksi pemerintah, tetapi mampu menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa di kelasnya.
- ✓ Ciri-ciri guru yang mandiri:
- Mampu menyusun RPP dan modul ajar yang kontekstual dan inovatif.
 - Melakukan penilaian otentik (autentik assessment) dengan alat ukur yang variatif.
 - Menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran sesuai kebutuhan (diferensiasi, PBL, TPACK, dll).

- ✓ Evaluasi dapat dilakukan melalui:
 - Portofolio dokumen pembelajaran yang disusun oleh guru.
 - Observasi kelas oleh kepala sekolah dan pengawas.
 - Penilaian kinerja guru melalui instrumen PKG (Penilaian Kinerja Guru).
- ✓ Manfaat dari kemandirian guru:
 - Pembelajaran menjadi lebih responsif terhadap kondisi siswa.
 - Guru lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kurikulum nasional.
 - Meningkatkan profesionalisme dan rasa percaya diri guru.

Strategi-strategi tersebut bukan hanya upaya teknis-administratif, melainkan bentuk komitmen untuk menciptakan sistem pendidikan yang hidup, bermakna, dan relevan. Administrasi kurikulum yang baik akan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas dan mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, pengembangan administrasi kurikulum harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan baik di tingkat sekolah maupun nasional.

C. PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

Bagian Kedua Kurikulum dan Pembelajaran

Pasal 7

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan di bidang kurikulum dan pembelajaran paling sedikit menghasilkan:
 - a. kurikulum Satuan Pendidikan;
 - b. program pembelajaran; dan
 - c. program penilaian.

- (2) Kurikulum Satuan Pendidikan disusun berdasarkan pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional serta berpedoman pada visi, misi, dan karakteristik Satuan Pendidikan.
- (3) Program pembelajaran disusun secara fleksibel, jelas, dan sederhana sesuai dengan konteks dan karakteristik Peserta Didik.
- (4) Program penilaian disusun untuk membangun budaya reflektif dan memberi umpan balik yang konstruktif secara berkala.

Pasal 8

- (1) Dalam menyusun perencanaan kegiatan pendidikan yang memuat kurikulum dan pembelajaran, Satuan Pendidikan menetapkan:
 - a. jumlah Peserta Didik pada setiap rombongan belajar; dan
 - b. jumlah rombongan belajar pada setiap Satuan Pendidikan.
- (2) Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak:
 - a. 10 (sepuluh) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - b. 12 (dua belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
 - c. 15 (lima belas) Peserta Didik untuk pendidikan anak usia dini dari usia di atas 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - d. 28 (dua puluh delapan) Peserta Didik untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
 - e. 32 (tiga puluh dua) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah;
 - f. 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan;
 - g. 5 (lima) Peserta Didik untuk sekolah dasar luar biasa;
 - h. 8 (delapan) Peserta Didik untuk sekolah menengah pertama luar biasa dan sekolah menengah atas luar biasa;
 - i. 20 (dua puluh) Peserta Didik untuk program paket A atau bentuk lain yang sederajat;
 - j. 25 (dua puluh lima) Peserta Didik untuk program paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan

- k. 30 (tiga puluh) Peserta Didik untuk program paket C atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penetapan jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dilakukan berdasarkan:
- a. ketersediaan jumlah pendidik;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. kapasitas anggaran penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (4) Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Satuan Pendidikan yang dapat diakses oleh Peserta Didik dalam suatu wilayah dan/atau terdapat keterbatasan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan, jumlah Peserta Didik per rombongan belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pendidikan anak usia dini berjumlah 1 (satu) sampai dengan 16 (enam belas) rombongan belajar;
 - b. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah berjumlah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) rombongan belajar;
 - c. sekolah dasar luar biasa berjumlah 6 (enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) rombongan belajar; d. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah/sekolah menengah pertama luar biasa berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 33 (tiga puluh tiga) rombongan belajar;
 - e. sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah atas luar biasa berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar;
 - f. sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar; dan
 - g. Satuan Pendidikan kesetaraan berjumlah 3 (tiga) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar.
- (6) Penetapan jumlah rombongan belajar setiap Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:

- a. ketersediaan jumlah pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana pada Satuan Pendidikan; dan
 - c. kondisi geografis dan demografis.
- (7) Dalam hal Satuan Pendidikan merupakan Satuan Pendidikan:
- a. yang baru didirikan;
 - b. melaksanakan pembelajaran kelas rangkap; dan/atau
 - c. yang berada di daerah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jumlah rombongan belajar per Satuan Pendidikan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua

Kurikulum dan Pembelajaran

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran ditujukan untuk:
- a. menciptakan iklim Satuan Pendidikan
 - b. melaksanakan kurikulum Satuan Pendidikan, program pembelajaran, dan program penilaian secara berkala sebagai siklus reflektif untuk perbaikan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan;
 - c. melaksanakan pengembangan karakter Peserta Didik;
 - d. mewujudkan pembelajaran yang kondusif dan aman; dan
 - e. melaksanakan pembinaan bakat dan minat Peserta Didik.
- (2) Menciptakan iklim Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a agar mampu mendorong:
- a. peningkatan kualitas pembelajaran;
 - b. terwujudnya inklusivitas;
 - c. terwujudnya toleransi terhadap kebinekaan;
 - d. terwujudnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman; dan
 - e. tumbuhnya budaya belajar bagi Peserta Didik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan:
- a. diselaraskan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja berdasarkan standar kompetensi kerja; dan

- b. ditujukan untuk memenuhi ketersediaan lulusan pendidikan menengah kejuruan yang terserap oleh dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dan/atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan khusus mempertimbangkan:
 - a. bentuk akomodasi yang layak berdasarkan jenis ragam disabilitas;
 - b. kebutuhan Peserta Didik dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - c. ketersediaan tenaga ahli yang relevan.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang kurikulum dan pembelajaran pada pendidikan kesetaraan mempertimbangkan:
 - a. fleksibilitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Peserta Didik; dan
 - b. kemandirian Peserta Didik dalam melakukan pembelajaran.

BAB VI

IMPLEMENTASI

ADMINISTRASI KURIKULUM

DI SD AL IRSYAD

SURAKARTA

A. PERJALANAN DAN IMPLEMENTASI KURIKULUM

1. Sejarah Perkembangan Kurikulum

SD Al Irsyad sebagai lembaga pendidikan dasar Islam telah melalui berbagai fase dalam pelaksanaan kurikulum nasional. Setiap perubahan kurikulum di tingkat nasional direspons dan diadaptasi sesuai dengan visi, misi, serta karakteristik sekolah sebagai lembaga berbasis nilai-nilai keislaman. Adapun tahapan perkembangan kurikulum yang telah diimplementasikan di SD Al Irsyad antara lain sebagai berikut:

a. Kurikulum 1994

Pada periode ini, pembelajaran masih berorientasi pada guru (teacher-centered) dan berfokus pada penguasaan materi pelajaran. Model pembelajaran bersifat satu arah dan tidak banyak memberikan ruang bagi siswa untuk aktif, sehingga proses belajar lebih bersifat instruksional dan kaku.

b. Kurikulum 2004 (KBK)

Kurikulum ini mulai memperkenalkan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi (competency-based learning), yang berorientasi pada pengembangan kemampuan siswa. Meskipun implementasinya belum maksimal, langkah ini menjadi awal dari pergeseran paradigma pembelajaran ke arah student-centered learning.

c. Kurikulum 2006 (KTSP)

Melalui kurikulum ini, sekolah diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum secara mandiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. SD Al Irsyad memanfaatkan fleksibilitas tersebut dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman secara eksplisit melalui muatan lokal wajib seperti Tahfidz Al-Qur'an, Bahasa Arab, dan Akidah Akhlak. Penyesuaian ini menjadikan kurikulum lebih kontekstual dan sesuai dengan karakter sekolah islam.

d. Kurikulum 2013 (K-13)

Kurikulum ini menekankan pada pendekatan ilmiah (scientific approach) yang melibatkan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selain itu, aspek penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup aspek sikap spiritual dan sosial. SD Al Irsyad mengimplementasikan pendekatan ini dengan tetap mempertahankan integrasi nilai-nilai keislaman dalam seluruh kegiatan pembelajaran.

e. Kurikulum Merdeka (2022–sekarang)

Sebagai salah satu sekolah penggerak, SD Al Irsyad menjadi pelaksana awal Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menyusun perangkat pembelajaran seperti Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Modul Ajar. Dalam implementasinya, seluruh perangkat tersebut dirancang dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan kebutuhan peserta didik agar pembelajaran menjadi bermakna dan berkarakter.

2. Implementasi Kurikulum Merdeka

Dalam Kurikulum Merdeka, guru diberikan kebebasan menyusun Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), serta Modul Ajar. Di SD Al Irsyad, semua perangkat tersebut disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan peserta didik.

Implementasi Kurikulum Merdeka di SD Al Irsyad menekankan pada pendekatan tematik integratif, terutama pada jenjang kelas rendah (kelas 1–3), di mana berbagai mata pelajaran dikemas dalam tema-tema

besar yang menyatu. Sementara itu, pada semua jenjang, nilai-nilai Islam diintegrasikan secara menyeluruh ke dalam setiap mata pelajaran maupun kegiatan pembelajaran.

Guru memiliki keleluasaan dalam menyusun rencana dan strategi pembelajaran, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikembangkan di sekolah ini diorientasikan untuk menanamkan karakter Islami dan akhlak mulia melalui kegiatan nyata. Beberapa proyek pembelajaran yang telah dilaksanakan di antaranya:

a. Proyek Cinta Masjid

Siswa diajak untuk terlibat langsung dalam kegiatan menjaga kebersihan musala sekolah serta mempraktikkan adab-adab memasuki dan berada di masjid. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap tempat ibadah sejak dini.

b. Proyek Ramadhan

Pada bulan suci Ramadhan, sekolah mengadakan kegiatan buka puasa bersama serta pemberian santunan kepada kaum dhuafa. Kegiatan ini mendidik siswa untuk peduli terhadap sesama dan menumbuhkan semangat berbagi.

c. Proyek Eco-Islami

Proyek ini mengangkat isu pelestarian lingkungan hidup dengan pendekatan nilai-nilai Islam. Siswa belajar tentang pentingnya menjaga alam melalui ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

d. Proyek Sirah Nabawiyah

Kegiatan literasi ini memfokuskan pada pembacaan dan penelaahan kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad saw. Tujuannya adalah untuk menanamkan keteladanan serta membentuk karakter yang mencerminkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

B. PELAKU ADMINISTRASI KURIKULUM

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui struktur pelaksana kurikulum beserta uraian tugas masing-masing jabatan :

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah berperan sangat sentral sebagai koordinator utama dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah, yang tidak hanya bertugas mengambil kebijakan strategis terkait pengembangan dan implementasi kurikulum, tetapi juga harus memastikan seluruh program kurikulum berjalan selaras dengan visi dan misi sekolah. Selain itu, kepala sekolah harus mampu mengarahkan dan mengoordinasi berbagai kegiatan pembelajaran dan pengembangan sekolah secara efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Kepala sekolah juga menjalankan fungsi supervisi dengan memberikan bimbingan dan motivasi kepada guru serta tenaga pendidik agar mereka dapat meningkatkan kreativitas dan kompetensi dalam mengembangkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam menyusun jadwal pelajaran dan perangkat pembelajaran yang akan digunakan di sekolah, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan terstruktur dan sistematis.

Selain itu, wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan akademik untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Tidak hanya berhenti pada pengawasan, wakil kepala sekolah bidang kurikulum juga bertugas melakukan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi kekurangan maupun kelebihan dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan yang tepat.

3. Koordinator Kesiswaan

Koordinator kesiswaan memiliki peran penting dalam mengintegrasikan berbagai kegiatan nonakademik, seperti ekstrakurikuler dan pembinaan karakter, ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Peran ini menjadi sangat krusial karena, selain mendukung

pengembangan akademik siswa, kegiatan nonakademik juga membantu membentuk karakter dan sikap sosial yang positif.

Dengan demikian, koordinator kesiswaan tidak hanya bertugas mengorganisasi dan mengelola kegiatan tersebut, tetapi juga memastikan agar seluruh aktivitas nonakademik tersebut selaras dan terhubung dengan tujuan kurikulum dan pembelajaran yang sedang berjalan. Selain itu, integrasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan yang seimbang antara aspek akademik dan pembentukan nilai-nilai karakter siswa, sehingga perkembangan peserta didik bersifat menyeluruh dan holistik.

4. Guru Kelas dan Mata Pelajaran

Guru kelas dan guru mata pelajaran memegang peran sentral sebagai pelaksana utama dalam proses pembelajaran di kelas, yang mencakup berbagai tugas mulai dari menyusun materi ajar hingga mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman maupun penanaman karakter secara konsisten ke dalam setiap kegiatan belajar mengajar sehari-hari, sehingga pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif tetapi juga pada pembentukan kepribadian siswa secara menyeluruh.

C. PROGRAM UNGGULAN: ZIYADAH TAHFIDZ

Salah satu program unggulan di SD Al Irsyad Surakarta adalah program Ziyadah Tahfidz. Program ini bukan sekadar kegiatan tambahan yang dilakukan di luar jam pelajaran, tetapi telah menjadi bagian yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Program ini dirancang untuk mencetak generasi Qur'ani yang tidak hanya hafal ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan program ini menunjukkan komitmen sekolah dalam menggabungkan pendidikan akademik dan spiritual secara harmonis..

1. Karakteristik Program

a. Selektif dan Terstruktur

Program Ziyadah Tahfidz diikuti oleh siswa yang telah melalui proses seleksi. Artinya, tidak semua siswa secara otomatis masuk ke dalam program ini. Tes seleksi meliputi kemampuan dasar membaca

Al-Qur'an, kesiapan mental untuk mengikuti program intensif, serta dukungan dari orang tua. Setelah dinyatakan lolos, siswa akan mengikuti program dengan sistem pembinaan yang terstruktur dan jelas. Ada panduan jadwal, target mingguan, monitoring capaian, dan pembinaan karakter secara berkala. Guru tahfidz yang terlibat juga telah mendapatkan pelatihan dan memiliki latar belakang pendidikan Al-Qur'an yang kuat.

b. Intensif

Program ini memiliki jadwal yang intensif, dengan frekuensi hafalan setiap hari. Setiap siswa dibimbing untuk menghafal 15 baris ayat Al-Qur'an per hari. Target ini cukup menantang, namun dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing. Suasana hafalan dibuat nyaman dan tenang agar siswa fokus. Selain hafalan baru (ziyadah), siswa juga wajib mengulang hafalan lama secara rutin (muroja'ah), agar hafalan tetap melekat dan tidak mudah lupa. Hal ini menjadikan siswa tidak hanya kuat dalam menambah hafalan, tetapi juga memiliki hafalan yang stabil dan terjaga kualitasnya.

c. Metode

Metode yang digunakan dalam program ini adalah talaqqi dan muroja'ah intensif. Talaqqi berarti guru membacakan terlebih dahulu ayat yang akan dihafal, kemudian siswa menirukan dan menghafalkannya secara langsung. Guru akan membetulkan jika ada kesalahan bacaan atau tajwid. Setelah itu, siswa mengulang hafalan tersebut secara mandiri maupun berkelompok. Kegiatan muroja'ah dilakukan setiap hari Jumat atau setelah pencapaian hafalan tertentu, agar siswa tetap menjaga hafalan sebelumnya. Metode ini terbukti efektif dalam mempertahankan hafalan jangka panjang dan meningkatkan kualitas bacaan siswa.

d. Pengawasan ketat

Setiap siswa memiliki catatan hafalan yang dipantau secara pribadi oleh guru tahfidz. Jika ada siswa yang mengalami penurunan capaian atau tidak mencapai target hafalan, maka akan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Salah satu langkah pembinaan adalah dengan memanggil orang tua siswa untuk melakukan pendampingan

bersama, baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya komunikasi antara guru dan orang tua, proses hafalan menjadi lebih efektif dan mendapat dukungan dari lingkungan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa program tahfidz tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan kolaborasi antara sekolah dan rumah.

2. Jadwal dan Target

a. Jadwal Pelaksanaan.

Program Ziyadah Tahfidz dilaksanakan setiap pagi hari sebelum pelajaran umum dimulai, yaitu pukul 07.00–07.30. Waktu pagi dipilih karena merupakan waktu terbaik untuk menghafal, di mana kondisi fisik dan mental siswa masih segar. Rutinitas ini juga membantu menanamkan kedisiplinan kepada siswa dalam hal waktu, kesiapan belajar, dan semangat memulai hari dengan Al-Qur'an. Suasana pagi di sekolah menjadi lebih khushyuk dan penuh keberkahan dengan kegiatan ini.

b. Target Hafalan.

Target yang ditetapkan dalam program ini cukup tinggi, yaitu minimal 3 juz dalam satu tahun ajaran. Dengan pembinaan yang konsisten, target ini dapat tercapai. Bahkan ada siswa yang mampu menghafal lebih dari target tersebut. Pencapaian ini tentunya tidak terlepas dari kedisiplinan siswa, dukungan guru, dan metode yang digunakan dalam program ini. Target hafalan dibagi menjadi tahapan-tahapan kecil agar lebih terukur, dan setiap siswa diberi kesempatan untuk menyelesaikannya sesuai kemampuan.

c. Pencapaian Siswa.

Program ini telah menghasilkan banyak siswa yang mencapai prestasi luar biasa. Misalnya, ada siswa kelas 4 yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz, atau siswa kelas 2 yang mampu menghafal 5 juz. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi sekolah dan motivasi bagi siswa lainnya. Pencapaian siswa juga diumumkan secara terbuka dalam kegiatan tertentu seperti wisuda tahfidz atau apel pagi, agar memberi semangat kepada siswa lain untuk terus berproses.

3. Materi Hafalan

a. Kelas 1

Siswa kelas 1 memulai hafalan dengan surat Al-Balad. Surat ini dipilih karena terdiri dari ayat-ayat pendek dan mudah dipahami. Proses hafalan difokuskan pada pelatihan bacaan yang benar dan menanamkan semangat cinta Al-Qur'an. Guru membimbing dengan pendekatan kasih sayang agar siswa tidak merasa terbebani.

b. Kelas 2

Di kelas 2, hafalan ditingkatkan dengan menambahkan surat An-Naba', serta surat-surat lainnya dari juz 30. Di fase ini, siswa mulai dibiasakan untuk hafalan lebih banyak dan disiplin dalam muroja'ah. Guru juga memperhatikan kestabilan hafalan agar siswa tidak cepat lupa.

c. Kelas 3 dan seterusnya.

Pada jenjang ini, siswa melanjutkan hafalan ke surat-surat dalam juz 29 dan 28, serta mulai masuk ke juz 1. Penentuan surat tergantung pada capaian masing-masing siswa. Siswa yang sudah menyelesaikan hafalan dasar akan diarahkan ke hafalan lanjutan secara bertahap. Materi hafalan juga tetap mempertimbangkan kondisi psikologis dan kemampuan kognitif siswa.

4. Pembinaan Karakter Qur'ani

a. Tujuan Pembinaan

Pembinaan karakter menjadi bagian penting dalam program Ziyadah Tahfidz. Sekolah tidak hanya menekankan hafalan secara tekstual, tetapi juga berusaha membentuk siswa yang mencerminkan akhlak Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Guru tahfidz menjadi teladan dalam berperilaku, bersikap lembut, sabar, dan tegas dalam mendidik.

b. Nilai-Nilai yang Ditanamkan

1) Bersih dan Tertib

Siswa diajarkan pentingnya menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan sebagai bagian dari adab seorang muslim. Mereka dilatih untuk membersihkan tempat duduk sebelum dan sesudah kegiatan, serta menjaga kerapian dalam berpakaian dan alat tulis.

2) Hormat kepada Guru

Program ini menekankan nilai adab kepada guru. Siswa dibiasakan untuk mengucapkan salam, memperhatikan saat guru menyampaikan pelajaran, dan tidak menyela ketika orang lain berbicara.

3) Disiplin dan Tanggung Jawab

Kedisiplinan menjadi nilai utama dalam program ini. Siswa harus hadir tepat waktu, membawa buku hafalan, mengisi laporan harian, dan bertanggung jawab atas target hafalan masing-masing. Bila ada ketertinggalan, siswa diajak untuk mengejar dengan cara yang menyenangkan, tanpa tekanan.

Dengan sistem yang terorganisir, pembinaan karakter yang menyentuh aspek spiritual dan sosial, serta dukungan penuh dari guru dan orang tua, program Ziyadah Tahfidz di SD Al Irsyad Surakarta mampu menciptakan generasi muda yang cinta Al-Qur'an, berprestasi, dan berakhlak mulia. Program ini juga menjadi nilai tambah penting yang membedakan SD Al Irsyad dari sekolah-sekolah lain.

D. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Evaluasi dilaksanakan melalui rapat rutin setiap Jumat dan secara insidental pada hari Sabtu, evaluasi mencakup:

1. Pemetaan pencapaian pembelajaran

Pemetaan pencapaian pembelajaran adalah proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, merinci, dan mengorganisasikan tujuan atau target yang ingin dicapai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Proses ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas tentang apa saja kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran tertentu. Dengan pemetaan yang baik, pendidik dapat memastikan bahwa semua materi pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi saling berkaitan secara terstruktur sehingga pencapaian tujuan pembelajaran menjadi lebih terukur dan efektif.

Selain itu, pemetaan pencapaian pembelajaran juga membantu dalam menyelaraskan proses pembelajaran dengan standar kurikulum yang berlaku, sehingga setiap langkah pembelajaran diarahkan untuk

memenuhi kompetensi yang ditetapkan. Proses ini memudahkan guru untuk merancang perangkat pembelajaran dan asesmen yang sesuai dengan target capaian, serta memantau perkembangan peserta didik secara berkelanjutan. Dengan kata lain, pemetaan pencapaian pembelajaran merupakan alat penting yang berfungsi sebagai kompas bagi pendidik dan peserta didik, agar proses pembelajaran berjalan dengan fokus dan menghasilkan output yang optimal sesuai harapan.

Secara rinci, pemetaan pencapaian pembelajaran meliputi beberapa tahapan berikut:

- a. Identifikasi tujuan pembelajaran berdasarkan kurikulum dan kebutuhan peserta didik.
 - b. Penguraian kompetensi dasar atau indikator pencapaian yang spesifik dan terukur.
 - c. Penyusunan materi pembelajaran yang relevan dan mendukung pencapaian tujuan.
 - d. Penentuan metode dan strategi pembelajaran yang tepat untuk mengoptimalkan proses belajar.
 - e. Perancangan alat penilaian (asesmen) untuk mengukur ketercapaian tujuan secara valid dan reliabel.
 - f. Pemantauan dan evaluasi hasil belajar untuk memastikan keberhasilan pencapaian pembelajaran dan menentukan tindak lanjut pembelajaran.
2. Penyesuaian materi dengan kebutuhan siswa

Penyesuaian materi dengan kebutuhan siswa adalah suatu upaya untuk menyelaraskan isi dan cara penyampaian materi pembelajaran agar sesuai dengan kondisi, kemampuan, minat, dan gaya belajar masing-masing siswa. Hal ini penting karena setiap siswa memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan yang berbeda dalam menerima materi. Dengan menyesuaikan materi, guru dapat memastikan bahwa siswa benar-benar memahami pelajaran dan mampu mengikuti proses belajar secara optimal.

Proses penyesuaian ini biasanya diawali dengan analisis kebutuhan belajar siswa melalui asesmen diagnostik, observasi, dan komunikasi dengan siswa maupun orang tua untuk mengetahui kesiapan, minat, serta gaya belajar mereka. Dari hasil pemetaan tersebut, guru kemudian

merancang materi pembelajaran yang fleksibel, yang bisa berupa penyederhanaan konten untuk siswa yang belum siap, penambahan bahan yang menantang bagi yang lebih mahir, atau variasi dalam cara penyampaian materi, seperti menggunakan gambar, video, diskusi, atau praktik langsung. Pendekatan ini dikenal sebagai pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru juga menyesuaikan proses dan produk pembelajaran, bukan hanya isi materi saja.

3. Evaluasi strategi pembelajaran

Evaluasi strategi pembelajaran adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas metode dan pendekatan yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana strategi pembelajaran mampu mengembangkan potensi peserta didik serta mencapai hasil yang diharapkan secara optimal. Dalam evaluasi strategi pembelajaran, guru tidak hanya melihat hasil akhir belajar siswa, tetapi juga mengamati proses pembelajaran secara keseluruhan, sehingga dapat menilai apakah metode yang digunakan sudah tepat, efektif, dan efisien.

Proses evaluasi ini meliputi berbagai aspek, seperti pencapaian tujuan pembelajaran, ketercapaian indikator, penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta dampak strategi tersebut terhadap motivasi dan perkembangan siswa. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan pengembangan strategi pembelajaran ke depannya, termasuk menyesuaikan metode, bahan ajar, dan teknik evaluasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Dengan demikian, evaluasi strategi pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil, tetapi juga sebagai mekanisme umpan balik yang membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan.

Selain itu, evaluasi strategi pembelajaran sering menggunakan berbagai metode penilaian, seperti tes tertulis, portofolio, observasi, proyek, dan penilaian performa siswa, agar mendapatkan gambaran menyeluruh dari hasil proses pembelajaran. Pendekatan evaluasi yang berorientasi pada proses dan hasil memungkinkan guru mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan strategi yang diterapkan sehingga bisa merancang langkah tindak lanjut yang efektif. Evaluasi yang baik juga

mempertimbangkan keberagaman kebutuhan siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif, sehingga mendorong peningkatan motivasi dan prestasi belajar secara berkelanjutan

E. SARANA PENDUKUNG

Sarana pendukung administrasi kurikulum di SD Al Irsyad Surakarta juga sangat memadai. Setiap kelas dilengkapi dengan perangkat pembelajaran lengkap, seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, serta dokumen penunjang lainnya. Selain itu, sekolah menyediakan fasilitas teknologi berupa komputer, printer, dan akses Wi-Fi untuk mendukung aktivitas administrasi dan pembelajaran digital. Pelaporan hasil belajar siswa juga dikelola secara rapi melalui sistem spreadsheet yang kemudian dicetak menjadi rapor resmi, sehingga memudahkan guru dan orang tua dalam memantau perkembangan akademik peserta didik.

A. Tantangan dan Harapan

Guru dan kepala sekolah berharap kurikulum dapat lebih stabil dan tidak terlalu sering mengalami pergantian, agar program pembelajaran bisa dirancang secara optimal. Tantangan lainnya adalah menyelaraskan standar nasional dengan kebutuhan siswa secara individual, namun SD Al Irsyad menghadapinya dengan memberikan kebebasan guru dalam menyusun dan menyesuaikan perangkat ajar.

BAB VII

PENUTUP

Administrasi kurikulum merupakan proses penting dalam dunia pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan fungsi utama seperti meningkatkan efektivitas pembelajaran, efisiensi sumber daya, serta keterlibatan masyarakat, administrasi kurikulum membantu memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai arah yang ditetapkan. Prinsip-prinsip seperti relevansi, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, dan fleksibilitas menjadi landasan dalam pengelolaan kurikulum. Selain itu, guru memiliki peran sentral dalam implementasi administrasi kurikulum sebagai pelaksana, penyelaras, pengembang, dan peneliti. Mereka tidak hanya menjalankan kurikulum, tetapi juga menyesuaikan dan mengembangkan isi kurikulum berdasarkan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman.

Perkembangan kurikulum di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, budaya, dan kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berubah dari masa ke masa. Sejak kemerdekaan hingga era Kurikulum Merdeka, setiap kurikulum memiliki ciri khas dan tujuan yang berupaya menjawab tantangan zaman serta membentuk karakter bangsa. Perubahan kurikulum bukanlah sekadar pergantian administratif, melainkan bagian dari proses adaptif sistem pendidikan nasional dalam membentuk generasi yang berkualitas.

Faktor-faktor yang mendorong perubahan kurikulum meliputi kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, tuntutan dunia kerja, dinamika sosial budaya, hasil evaluasi kurikulum sebelumnya, serta dorongan globalisasi. Semua faktor ini saling berkaitan dan menuntut sistem pendidikan yang fleksibel serta responsif terhadap perubahan. Administrasi kurikulum memainkan peran penting dalam mewujudkan efektivitas implementasi kurikulum. Melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan

evaluasi, satuan pendidikan dapat menyusun strategi yang tepat untuk menjalankan kurikulum sesuai konteks lokal.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan di SD Al Irsyad Surakarta, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi kurikulum di sekolah ini berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan visi sekolah untuk membentuk generasi muslim yang cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan global.

Perjalanan kurikulum yang diterapkan SD Al Irsyad Surakarta menunjukkan komitmen sekolah dalam menyesuaikan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, mulai dari Kurikulum 1994 hingga Kurikulum Merdeka. Setiap perubahan kurikulum disertai dengan upaya penyesuaian yang menekankan pada penguatan nilai-nilai keislaman, baik melalui materi pembelajaran, pendekatan tematik, maupun kegiatan proyek berbasis profil pelajar Pancasila bernuansa Islami.

Keunikan lain yang menjadi ciri khas sekolah ini adalah adanya program unggulan Ziyadah Tahfidz yang terstruktur, selektif, dan terintegrasi dengan kurikulum resmi. Program ini tidak hanya berfokus pada capaian hafalan Al-Qur'an, tetapi juga mendukung pembentukan karakter Qur'ani pada diri peserta didik.

Dari segi administrasi, sekolah memiliki perangkat dokumen yang lengkap, mulai dari Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), Modul Ajar, hingga sistem pengarsipan rapor berbasis digital. Pelaksanaan evaluasi kurikulum juga dilakukan secara rutin melalui rapat mingguan untuk memantau efektivitas pelaksanaan kurikulum dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi.

Dengan demikian, SD Al Irsyad Surakarta dapat dijadikan contoh praktik baik dalam pengelolaan administrasi kurikulum yang mengintegrasikan standar nasional dengan kebutuhan peserta didik dan nilai-nilai Islam. Harapannya, praktik ini dapat menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain untuk terus berinovasi dalam mengembangkan kurikulum yang relevan, adaptif, dan kontekstual sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achruh, Andi. 2022. "Komponen Dan Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4(6):1707–15.
- Afriansyah, H. (2019) *Administrasi Kurikulum*. Jurnal OSF, Padang.
- Ali, Muhammad. 2005. *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ansyar, Mohamad. 2015. *Kurikulum, Fondasi, Desain, dan Pengembangan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ananda, Adeliya Putri, and Hudaidah Hudaidah. 2021. "Perkembangan Kurikulum Pendidikan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa." *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*3(2):102–8. doi: 10.31540/sindang.v3i2.1192.
- Arifin, Zainal. 2011. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Azhar. 2020. "Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Dari Klasik Ke Modern." *FITRAH: International Islamic Education Journal* 2(2):104–24. doi: 10.22373/fitrah.v2i2.784.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Hamalik, Oemar. 1980. *Pengembangan Kurikulum (Dasar-Dasar Perkembangannya)*. Bandung: Mandar Maju. ———. 2007. *Manajemen*
- Hanissya, Olga Nadya Indra. 2017. "Analisis Perubahan Kebijakan Kurikulum 2013 Sebelum Revisi Dan Kurikulum 2013 Sesudah Revisi Di Sekolah." *Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga*549:40–42.
- Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (Newyork: Hartcourt, Brace and World, 1991), 6.
- Hr, S., & Wakia, N. (2021). *Problematika Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 175–184.
- Idhartono, A. R. (2022). *Literasi Digital Pada Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Anak Tunagrahita*. *Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 91–96.

- Insani, Farah Dina. 2019. "Sejarah Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga Saat Ini." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 8(1):43–64. doi: 10.51226/assalam.v8i1.132.
- Jannah, F., Irtifa, T., & Zahra, P. F. A. (2022). Problematika Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar 2022. *Al Yazidiy: Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Pendidikan*, 4(2), 55–65.
- Jumriani, Syaharuddin, and Mutiani. 2021. "Komponen Kurikulum." *Jurnal Basicedu* 5(3):1120–29.
- Kemendikbud. "Kurikulum." KBBI DARING. Last modified 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kurikulum>.
- Muhammedi, M. (2016). Perubahan Kurikulum di Indonesia: Studi Kritis Tentang Upaya Menemukan Kurikulum Pendidikan Islam yang Ideal. *Jurnal Raudhah*, 4(1).
- Mulyasa, E. (2013). *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurafianti, S., Rahayu, T., & Pramono, H. H. (2022). *Strategi Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter pada Pembelajaran Pendidikan Jasmani* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.
- Nur Azmi Rohimajaya, Rudi Hartono, Issy Yuliasri, Sri Wuli Fitriati, and Pascasarjana. 2022. "Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Merdeka Dalam Perkembangan Bahasa Inggris
- Sri Astuti M.(2018) *Buku Landasan Pengembangan Kurikulum*. Bandung : Rafa Production Sari, selpiani, hidatat, purnama. (2023). "Peran guru dalam implementasi administrasi Pendidikan". *Jurnal el- Fakhru, Islamic Education, Teaching and Studies*. Vol. 3, No. 1
- Soetopo Drs.Hendayat, Soemanto Drs Wast. 2008. "Komponen Komponen Pengembangan Kurikulum." *Jurnal Kurikulum* 282.
- Sugiarto. 2016. "濟無 No Title No Title No Title." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 4(1):1–23.
- Sukmawati, Henni. 2021. "Komponen-Komponen Kurikulum Dalam Sistem Pembelajaran." *Ash-Shahabah* 7(1):62–70.
- Syafaruddin, and Amiruddin. *Manajemen Kurikulum*. 1st ed. Medan: Perdana Publishing, 2017.

Turnip Helena, Sihombing Sriwati, Gaol Lumban Sulastri, Limbong Timothy Yosafat. “Administrasi Kurikulum,” *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1, (2023).

Undang-undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat (19)



Pendidikan dasar merupakan fondasi penting dalam membangun karakter dan kecakapan anak. Di dalamnya, kurikulum menjadi komponen inti yang mengarahkan tujuan, proses, serta hasil pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang administrasi kurikulum dan bagaimana implementasinya di sekolah dasar menjadi sangat penting, khususnya bagi pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa kependidikan, serta pengelola lembaga pendidikan. Buku ini disusun berdasarkan kajian teoritis dan pengalaman praktis yang diharapkan dapat menjadi referensi sekaligus pedoman dalam mengelola dan mengimplementasikan kurikulum secara efektif dan efisien. Kami berusaha menyajikan pembahasan secara sistematis, mulai dari konsep dasar administrasi kurikulum hingga implementasinya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar.



Administrasi

KURIKULUM DAN IMPLEMENTASINYA

DI SEKOLAH DASAR



IKAPI

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896-5427-3996



QR Code :
62-415-2088-705